

LAPORAN *SURVEILLANCE*
PERBANKAN INDONESIA
LSPI
TW I 2023

LAPORAN *SURVEILLANCE* PERBANKAN INDONESIA TW I 2023

Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulanan I-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan penyempurnaan dari Laporan Profil Industri Perbankan triwulanan sebelumnya dan lebih difokuskan pada analisa terkait pelaksanaan fungsi *surveillance* perbankan. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari data dan informasi yang disajikan.

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan I-2023 ini memuat *overview* dan analisis kondisi perekonomian global dan domestik dan kaitannya terhadap perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, serta profil risiko yang dihadapi oleh perbankan. Selain itu, dalam laporan ini tercakup juga kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh OJK pada periode laporan, perkembangan kelembagaan perbankan, serta koordinasi antar lembaga terkait perbankan. Selanjutnya, pada periode laporan ini terdapat pembahasan khusus terkait *economic overview* risiko yang dihadapi oleh *emerging market* dan Indonesia dalam ketidakpastian global, serta *lesson learned* dari krisis bank di Amerika Serikat (AS).

Secara sekilas *overview* perekonomian global dan domestik dapat disampaikan bahwa pada periode laporan pertumbuhan ekonomi global diproyeksi melambat seiring dengan ketidakpastian global yang masih cukup tinggi yang dipicu antara lain oleh konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, laju inflasi yang masih cukup tinggi meskipun mulai melandai, serta guncangan di sektor keuangan khususnya di AS dan Eropa. IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) April 2023 memproyeksikan bahwa perekonomian global tahun 2023 akan tumbuh 2,8% (yoy), lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,4% (yoy). Namun demikian, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, pada triwulan I-2023 ekonomi domestik mampu tumbuh baik yaitu sebesar 5,03% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan laporan utamanya ditopang tingginya kinerja ekspor dipengaruhi permintaan negara mitra dagang utama yang tetap kuat, serta membaiknya konsumsi seiring naiknya mobilitas dan aktivitas masyarakat, peningkatan daya beli, dan penurunan inflasi.

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan I-2023 tetap terjaga, tecermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan Rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold*. Berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik dan peningkatan mobilitas masyarakat, ikut mendorong tumbuhnya kredit perbankan per Maret 2023 sebesar 9,93% (yoy) meskipun melambat dari triwulan sebelumnya (11,35%, yoy) namun meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (6,67%, yoy). Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh cukup baik sebesar 7,00% (yoy) meski melambat dari tahun sebelumnya serta menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Hal ini tecermin dari tetap tingginya rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 128,87% dan 28,91%, meskipun lebih rendah dari tahun lalu seiring dengan akselerasi penyaluran kredit dan naiknya kewajiban pemenuhan GWM oleh BI. Permodalan juga cukup solid dan diyakini cukup mampu dalam menyerap risiko yang dihadapi dengan CAR sebesar 24,69%. Indikator likuiditas dan permodalan ini akan terus dijaga dan dipantau pada rentang yang memadai antara lain untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur di tengah tingginya risiko ketidakpastian perekonomian global. Risiko kredit juga masih terjaga dan membaik tecermin dari rasio NPL baik *gross* dan *net* masing-masing sebesar 2,49% dan 0,72% disertai dengan turunnya rasio *Loan at Risk* terhadap total kredit menjadi 13,94% dari tahun sebelumnya 18,79%. Sementara itu, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit yang meningkat meskipun DPK melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan rasio CAR BPR sebesar 32,73% antara lain ditopang oleh

kenaikan rentabilitas seiring dengan naiknya penyaluran kredit. Selain itu, CAR BPRS juga masih terjaga sebesar 22,78% meski lebih rendah dari tahun lalu.

Hal lain yang patut kita cermati ke depan adalah risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait potensi peralihan arus modal asing dari sentimen pengetatan kebijakan moneter global yang masih berlanjut khususnya di AS dan Eropa. Selain itu juga terdapat potensi kenaikan risiko kredit apabila terjadi kegagalan restrukturisasi maupun dikarenakan oleh peningkatan biaya dana yang dapat berdampak pada penurunan daya beli nasabah tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perbankan didorong untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan pembentukan tambahan CKPN secara memadai. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK mengeluarkan tiga kebijakan melalui Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) antara lain terkait: (i) Penerapan Pelaporan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi BUK KBMI 1 Non Bank Asing; (ii) Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, dan (iii) Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada *Term Deposit* Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia (TD OPT Valas BI). Selain itu, OJK juga menerbitkan tiga pengaturan terkait perbankan syariah. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Juni 2023



Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Box	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Infografis	xi

Bab 1

Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

1. Perekonomian Global	3
2. Perekonomian Domestik	5

Bab 2

Kinerja Industri Perbankan Nasional

1. Kinerja Bank Umum	19
2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	26
3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	28

Bab 3

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)	33
1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	33
2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)	35
3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM	37
B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS	39
1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	39
2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)	40

Daftar Box

Boks 1. <i>Economic overview: risiko yang dihadapi emerging markets dalam ketidakpastian global dan prospek Indonesia sebagai salah satu emerging markets terbesar di dunia</i>	9
Boks 2. <i>Lesson Learned Krisis Bank Amerika Serikat (AS): Silicon Valley Bank (SVB) dan First Republic Bank (FRC)</i>	13

Bab 4

Profil Risiko Perbankan

1. Risiko Kredit	43
2. Risiko Pasar	51
3. Risiko Likuiditas	54
4. Risiko Hukum	56

Bab 5

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

1. Pengaturan Perbankan	61
2. Kelembagaan Perbankan	64

Bab 6

Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	71
2. Koordinasi Bilateral	72

Lampiran

I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	77
II. <i>Glossary</i>	79

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum	19
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum	20
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan	20
Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank	22
Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	22
Tabel 6 Rasio Keuangan Bank Umum	24
Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum	24
Tabel 8 Komponen ATMR Bank Umum	25
Tabel 9 Rasio Keuangan BPR dan BPRS	26
Tabel 10 Indikator Umum BPR	26
Tabel 11 Indikator Umum BPRS	28
Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	33
Tabel 13 Porsi Penyaluran Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)	37
Tabel 14 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	39
Tabel 15 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)	40
Tabel 16 Perkembangan Kualitas Kredit	45
Tabel 17 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	46
Tabel 18 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan	46
Tabel 19 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	46
Tabel 20 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi	51
Tabel 21 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori	53
Tabel 22 Perkembangan LCR Perbankan	55
Tabel 23 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	56
Tabel 24 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	57
Tabel 25 Jaringan Kantor BUK	65
Tabel 26 Jaringan Kantor BPR	66
Tabel 27 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	68
Tabel 28 Jaringan Kantor BPRS	68

Daftar Grafik

Grafik 1 Angka Pengangguran AS, UK, dan Eropa	4
Grafik 2 Inflasi Konsumen	4
Grafik 3 Suku Bunga Acuan	4
Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Triwulan I-2023	4
Grafik 5 PMI Manufaktur Beberapa Negara	4
Grafik 6 Perkembangan Harga Komoditas	5
Grafik 7 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	5
Grafik 8 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	6
Grafik 9 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan	6
Grafik 10 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	7
Grafik 11 Perkembangan Aset Bank Umum	20
Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta	21
Grafik 13 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen	21
Grafik 14 Tren Pangsa Komposisi DPK	21
Grafik 15 Kredit per Valuta	23
Grafik 16 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	23
Grafik 17 Perkembangan Aset BPR	27
Grafik 18 Perkembangan DPK BPR	27
Grafik 19 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	27
Grafik 20 Tren Aset BPRS	29
Grafik 21 Tren Pertumbuhan DPK BPRS	29
Grafik 22 Tren ROA dan BOPO BPRS	30
Grafik 23 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial)	37
Grafik 24 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM	38
Grafik 25 Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	43
Grafik 26 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit (yoy)	43
Grafik 27 Pertumbuhan CKPN (yoy)	43
Grafik 28 Tren Kredit Restrukturisasi terkait COVID-19	44
Grafik 29 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	48
Grafik 30 Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi	48
Grafik 31 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi	48
Grafik 32 Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial)	51
Grafik 33 Dolar Index dan VIX Index	51
Grafik 34 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	52
Grafik 35 <i>Spread Yield</i> UST dan SBN	52
Grafik 36 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	52
Grafik 37 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan	53
Grafik 38 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor	53
Grafik 39 Perkembangan Parameter IRRBB	54
Grafik 40 LDR berdasarkan Valuta	54
Grafik 41 AL/NCD dan AL/DPK	54
Grafik 42 Perkembangan LCR dan NSFR	55
Grafik 43 Perkembangan Suku Bunga PUAB	56
Grafik 44 Penyebaran Jaringan Kantor BUK	64
Grafik 45 Penyebaran Jaringan Kantor BPR	66
Grafik 46 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	66
Grafik 47 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	67
Grafik 48 Penyebaran Jaringan Kantor BUS	68
Grafik 49 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	68

Ringkasan Eksekutif

Pada triwulan I-2023, perekonomian global diproyeksi tumbuh melambat seiring dengan ketidakpastian yang masih cukup tinggi antara lain dipicu oleh konflik Rusia - Ukraina yang masih berlanjut, laju inflasi yang masih cukup tinggi meskipun mulai melandai, serta guncangan di sektor keuangan khususnya di AS dan Eropa. IMF dalam WEO April 2023 memproyeksikan bahwa perekonomian global tahun 2023 akan tumbuh 2,8% (yoy), turun dari proyeksi WEO tahun 2022 sebesar 3,4% (yoy).

Di tengah ketidakpastian global tersebut, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2023 justru tumbuh sebesar 5,03% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan laporan utamanya ditopang tingginya kinerja ekspor dipengaruhi permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat, serta membaiknya konsumsi seiring naiknya mobilitas dan aktivitas masyarakat, peningkatan daya beli, dan penurunan laju inflasi.

Berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik juga terekam pada indikator perbankan sebagaimana terlihat pada masih relatif tingginya pertumbuhan kredit (bank umum) yaitu sebesar 9,93% (yoy) meskipun melambat dari triwulan sebelumnya (11,35%, yoy) namun meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (6,67%, yoy). Peningkatan kredit tersebut turut didorong oleh membaiknya aktivitas usaha dan meningkatnya tingkat keyakinan (optimisme) konsumen. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 7,00% (yoy) atau lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 9,95% (yoy). Faktor ini juga turut menopang kondisi likuiditas bank umum yang memadai sebagaimana tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 128,87% dan 28,91%, atau jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 24,69% yang utamanya ditopang peningkatan rentabilitas (ROA). Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang menurun masing-masing menjadi 2,49% dan 0,72%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang meningkat meskipun dengan DPK yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan CAR BPR sebesar 32,73% antara lain ditopang oleh kenaikan rentabilitas seiring dengan naiknya penyaluran kredit. Selain itu, CAR BPRS juga masih terjaga sebesar 22,78% meski lebih rendah dari tahun lalu. Meskipun kinerja perbankan cukup menggembirakan, namun perlu diperhatikan risiko lainnya utamanya risiko pasar yang berasal dari kenaikan *yield* obligasi maupun potensi risiko kredit apabila terjadi kegagalan restrukturisasi maupun karena meningkatnya biaya dana yang dapat berdampak pada penurunan daya beli nasabah.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi. Dalam penguatan regulasi, pada periode laporan, OJK mengeluarkan tiga kebijakan melalui Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) antara lain terkait: (i) Penerapan Pelaporan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi BUK KBMI 1 Non Bank Asing; (ii) Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, dan (iii) Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada *Term Deposit* Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia (TD OPT Valas BI). Selain itu, OJK juga menerbitkan tiga pengaturan terkait perbankan syariah. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

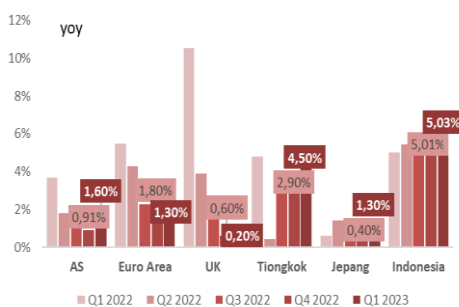
Triwulan I 2023

Ekonomi Global

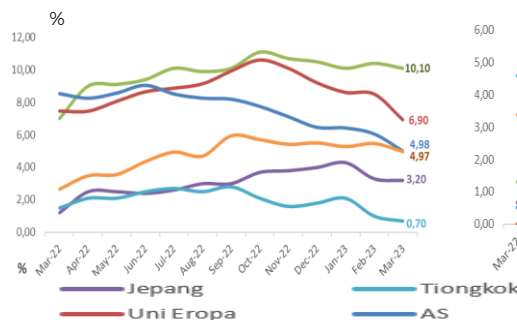


- IMF dalam *World Economic Outlook* April 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan tumbuh sebesar 2,8% (yoy), melambat dari proyeksi pada tahun 2022 sebesar 3,4% (yoy) sebagai pengaruh ketidakpastian global yang masih cukup tinggi.
- Beberapa otoritas moneter dunia masih menaikkan suku bunga acuan (khususnya The Fed, Bank of England, dan European Central Bank (ECB)) untuk mengatasi laju inflasi yang masih cukup tinggi meski mulai melandai.
- *Reopening* ekonomi Tiongkok diperkirakan dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam pada tahun 2023, namun perlu diwaspadai adanya guncangan sektor keuangan di AS dan Eropa.

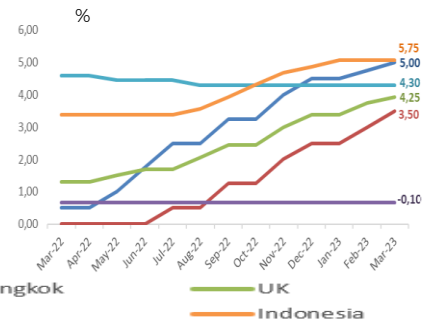
Pertumbuhan



Inflasi Global



Suku Bunga Global

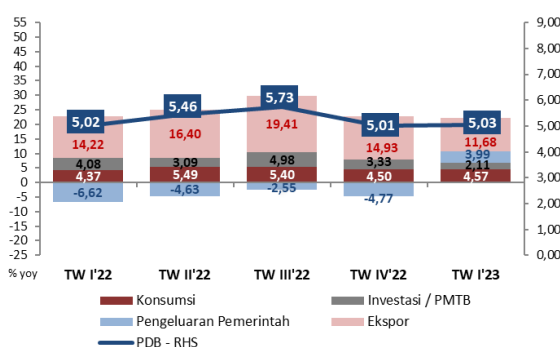


Ekonomi Domestik

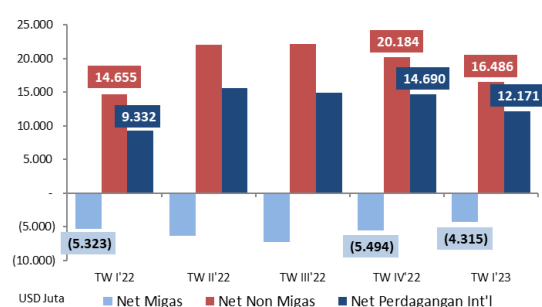
- Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2023 masih tumbuh kuat sebesar 5,03% (yoy), meningkat dari 5,01% (yoy) pada triwulan IV-2022. Pertumbuhan terutama ditopang oleh tetap tingginya kinerja ekspor dipengaruhi permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat, serta membaiknya konsumsi seiring naiknya mobilitas, peningkatan daya beli, dan penurunan inflasi.
- Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2023 utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian. Sektor transportasi dan pergudangan serta PAMM mencatatkan pertumbuhan tertinggi.



PDB Indonesia



Neraca Perdagangan



INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan I 2023

KINERJA

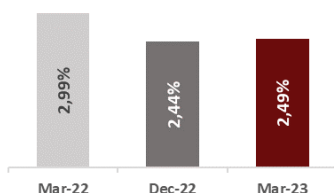


	Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA	
	9,22% (yoy)	9,95% (yoy)	6,67% (yoy)	24,79%	2,19%	TW I-22
	8,38% (yoy)	7,00% (yoy)	9,93% (yoy)	24,69%	2,77%	TW I-23
	Rp10.980T	Rp8.006T	Rp6.445T			
	9,02% (yoy)	9,70% (yoy)	6,66% (yoy)	24,85%	2,20%	
	7,80% (yoy)	6,38% (yoy)	9,22% (yoy)	24,63%	2,80%	
	Rp10.440T	Rp7.568T	Rp6.114T			
	14,23% (yoy)	15,08% (yoy)	9,35% (yoy)	23,13%*	1,99%*	
	17,68% (yoy)	18,02% (yoy)	19,25% (yoy)	26,01%*	2,18%*	
	Rp793T	Rp629T	Rp503T			

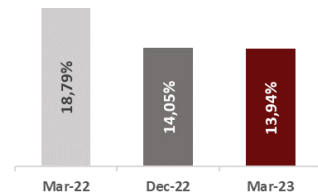
*Khusus rasio BUS

Risiko Kredit

NPL Gross

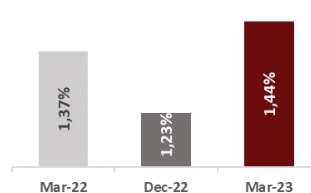


LaR



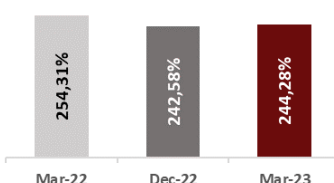
Risiko Pasar

PDN

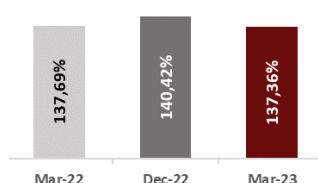


Risiko Likuiditas

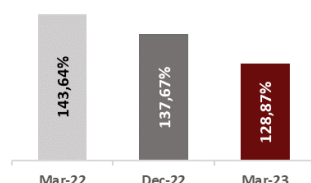
LCR



NSFR



AL/NCD



**PROFIL
RISIKO
BANK
UMUM**

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan I 2023

KINERJA



Bank
Perekonomian
Rakyat (BPR)



Bank
Perekonomian
Rakyat Syariah
(BPRS)



Aset

8,79% (yoy)

6,39% (yoy)

Rp182T



DPK

10,79% (yoy)

6,22% (yoy)

Rp127T



Kredit

7,53% (yoy)

9,77% (yoy)

Rp133T



CAR

38,17%

32,73%



ROA

1,76%

1,82%

TW I-22

TW I-23

15,02% (yoy)

18,20% (yoy)

Rp20T

18,10% (yoy)

17,21% (yoy)

Rp14T

15,59% (yoy)

21,41% (yoy)

Rp15T

24,09%

22,78%

1,74%

1,70%

KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN I 2023

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL	OBJEK PENGATURAN
Surat KEPP Nomor S-3/D.03/2023	Penerapan Pelaporan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi BUK KBMI 1 Non Bank Asing.	2 Februari 2023	BUK
Surat KEPP Nomor S-4/D.03/2023	Penyesuaian dan Penegasan SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	2 Februari 2023	Seluruh Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan/LPIP (PT Pefindo Biro Kredit, PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan, PT Kredit Biro Indonesia Jaya)
Surat KEPP Nomor S-5/D.03/2023	Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada <i>Term Deposit</i> Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia (TD OPT Valas BI)	8 Maret 2023	BUK

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan I 2023

KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN I 2023

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL	OBJEK PENGATURAN
SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2023	Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	12 Januari 2023	BPR Syariah
SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2023	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah	21 Februari 2023	Bank Umum (Konvensional dan Syariah)
SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2023	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah	21 Februari 2023	BPR dan BPR Syariah

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Halaman ini sengaja dikosongkan

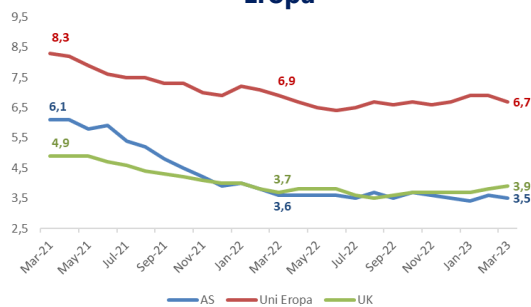
1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan I-2023, pertumbuhan ekonomi global diproyeksi melambat seiring ketidakpastian global yang masih cukup tinggi. Meski demikian, ekonomi domestik masih tumbuh cukup baik utamanya dipengaruhi kinerja ekspor yang tetap tumbuh tinggi dan konsumsi domestik yang membaik seiring dengan peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat.

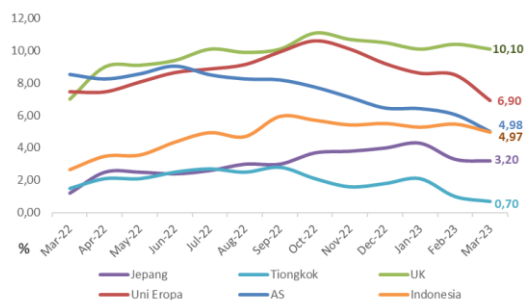
1. Perekonomian Global

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 global yang mulai terkendali, perekonomian global pada awal tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, inflasi yang masih cukup tinggi meskipun mulai melandai, serta guncangan di sektor keuangan sebagai dampak kenaikan suku bunga untuk menekan kenaikan inflasi pasca pandemi. Meskipun terdapat sinyal positif dari *reopening* perekonomian Tiongkok yang dapat menurunkan tekanan rantai pasok global, namun demikian pada awal 2023 terjadi guncangan di pasar keuangan, khususnya di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, yang memberikan kekhawatiran akan terjadinya *contagion effect* terhadap pasar keuangan global. Guncangan tersebut terjadi pada bank regional besar di AS dan bank di Eropa yang antara lain dipengaruhi oleh ketidakmampuan dalam menyesuaikan pengelolaan aset dan likuiditas dari kenaikan suku bunga yang relatif cepat.

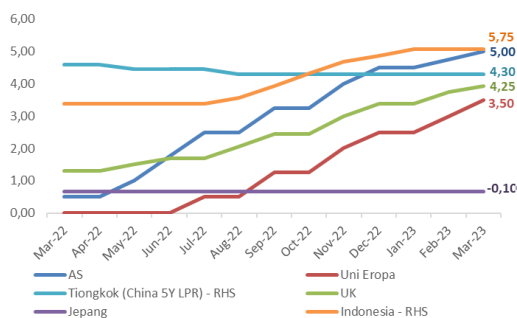
Dengan masih tingginya ketidakpastian ke depan, IMF dalam *World Economic Outlook* April 2023 memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 akan tumbuh sebesar 2,8% (yoy), melambat dari proyeksi tahun 2022 sebesar 3,4% (yoy), namun kemudian diproyeksikan akan kembali tumbuh sebesar 3,0% (yoy) pada tahun 2024. Proyeksi perlambatan terjadi baik di negara maju maupun di negara *emerging* atau berkembang, dengan proyeksi perlambatan lebih dalam pada negara maju. Sementara itu, laju inflasi di negara maju, khususnya United Kingdom (UK), Eropa, dan AS masih relatif tinggi meski sudah melandai. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan yang mulai membaik di ketiga wilayah dilihat dari penurunan angka pengangguran yang memperlambat laju penurunan inflasi. Hal ini membuat otoritas moneter di ketiga wilayah terkait masih melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dan diperkirakan mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih akan tetap tinggi di sepanjang tahun 2023.

Grafik 1 Angka Pengangguran AS, UK, dan Eropa

Sumber: Reuters

Grafik 2 Inflasi Konsumen

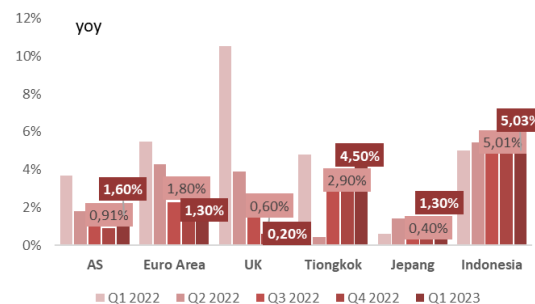
Sumber: Reuters

Grafik 3 Suku Bunga Acuan

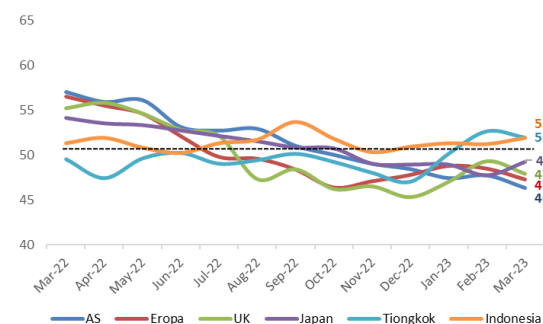
Sumber: Reuters

Di tengah tekanan ketidakpastian tersebut, beberapa negara mulai mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi, meskipun Eropa dan UK masih mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan I-2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan di UK dan Eropa dipengaruhi oleh belum membaiknya kegiatan usaha yang tercermin pada turunnya PMI Manufaktur dan penjualan ritel akibat inflasi yang masih cukup tinggi. Hal ini membuat Bank of England dan European Central Bank masih

meningkatkan suku bunga acuan untuk meredam tingginya laju inflasi tersebut. Sementara itu, ekonomi AS tumbuh meningkat antara lain didorong oleh peningkatan konsumsi, pengeluaran pemerintah dan ekspor, di tengah gesekan antara Pemerintah dan Parlemen AS terkait *government debt ceiling*. Di sisi lain, Ekonomi Tiongkok tumbuh lebih tinggi dari prakiraan awal seiring dengan pembukaan ekonomi pasca membaiknya kondisi pandemi Covid-19. Pertumbuhan didorong oleh naiknya penjualan ritel dan ekspor sejalan dengan PMI Manufaktur Tiongkok yang berada pada level ekspansi. Ekonomi Jepang juga tumbuh membaik didorong oleh pemulihan sektor jasa, utamanya sektor pariwisata seiring pembukaan kembali akses untuk wisatawan yang kemudian mendorong sisi konsumsi.

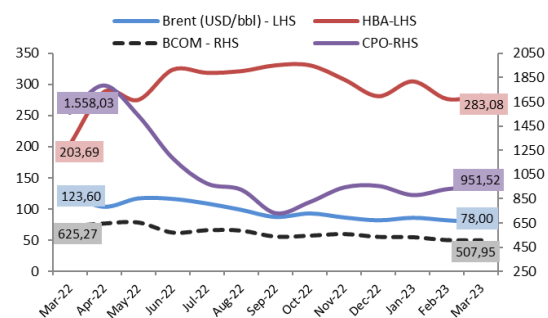
Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Triwulan I-2023

Sumber: Trading Economics dan Reuters

Grafik 5 PMI Manufaktur Beberapa Negara

Sumber: Reuters

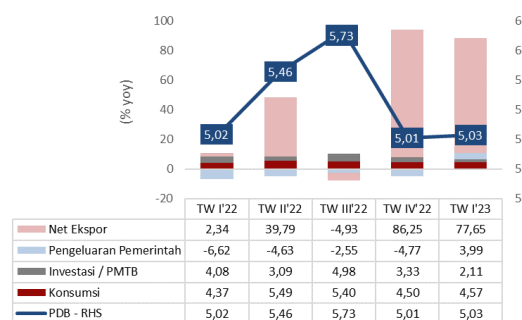
Seiring dengan normalisasi harga pasca membaiknya kondisi pandemi dan mulai melandainya laju inflasi, harga komoditas global terpantau menurun tecermin dari indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada Maret 2023 sebesar 507,95 turun dari 625,27 pada Maret 2022. Penurunan harga komoditas antara lain didorong oleh turunnya harga minyak mentah dunia dan CPO. Penurunan harga minyak mentah dunia didorong oleh tingginya persediaan dan turunnya permintaan terkait kekhawatiran pelemahan ekonomi global. Untuk menahan penurunan harga minyak lebih dalam, OPEC+ berencana untuk mengurangi produksi minyak mentah sampai tahun 2024. Sejalan dengan harga minyak, harga komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) juga turun signifikan seiring dengan turunnya permintaan dari India dan pengaruh perjanjian Rusia dan Ukraina terkait perdagangan biji-bijian yang memengaruhi turunnya harga minyak nabati. Selain itu, disetujuinya Undang-Undang bebas deforestasi di Eropa juga turut menekan penurunan harga CPO. Namun demikian, harga batubara masih lebih tinggi dari tahun lalu sebagai pengaruh naiknya permintaan dari Tiongkok meskipun mulai menurun sebagai pengaruh sentimen perlambatan perekonomian global. Ke depan, harga batubara diperkirakan berlanjut turun karena turunnya permintaan sebagai pengaruh sentimen fase peralihan ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Grafik 6 Perkembangan Harga Komoditas

Sumber: Reuters

2. Perekonomian Domestik

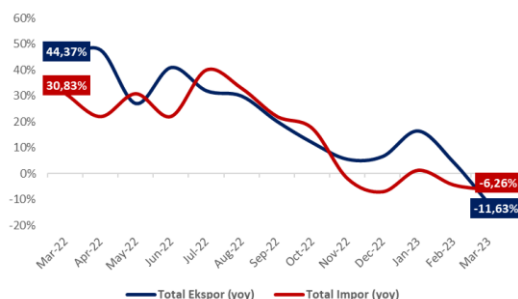
Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia masih tumbuh kuat sebesar 5,03% (yoy) pada triwulan I-2023, meningkat dari 5,01% (yoy) pada triwulan IV-2022. Pertumbuhan terutama ditopang oleh tetap tingginya kinerja ekspor dipengaruhi permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat, serta membaiknya konsumsi seiring naiknya mobilitas, peningkatan daya beli dan penurunan inflasi. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga masih tumbuh positif meskipun investasi melambat utamanya dari investasi bangunan yang masih terbatas.

Grafik 7 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran

Sumber: BPS

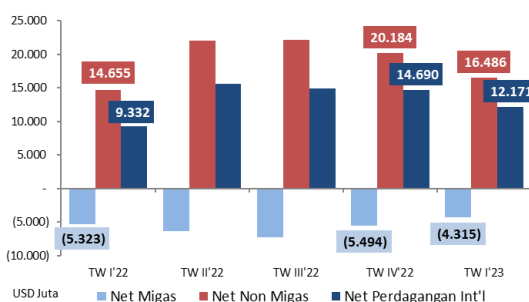
Kinerja ekspor (transaksi perdagangan internasional) masih menjadi komponen Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan tertinggi di mana *net export* tumbuh 77,65% (yoy) selama triwulan I-2023, meski melambat dari triwulan sebelumnya sebagai dampak dari melambatnya kontribusi ekspor terhadap PDB. Selain itu, pertumbuhan nilai perdagangan ekspor dan impor menunjukkan tren penurunan sebagai dampak sentimen perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus selama triwulan I-2023 sebesar USD12,17 miliar meskipun lebih rendah dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD14,69 miliar.

Grafik 8 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor



Sumber: BPS

Grafik 9 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

Selanjutnya, pada triwulan laporan, konsumsi tumbuh 4,57% (yoy) didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang memiliki porsi terbesar 54,62%. Kenaikan konsumsi rumah tangga terdapat pada semua sektor utamanya sektor transportasi dan komunikasi serta makanan dan minuman, sejalan dengan meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat yang mendorong kenaikan konsumsi. Selain itu, kenaikan konsumsi juga didorong oleh program perlindungan sosial Pemerintah antara lain berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako untuk menjaga daya beli masyarakat. Naiknya konsumsi tersebut juga ditunjukkan oleh kuatnya keyakinan konsumen Indonesia pada level optimis (>100) dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 123,3 per Maret 2023, meningkat dari 111 per Maret 2022.

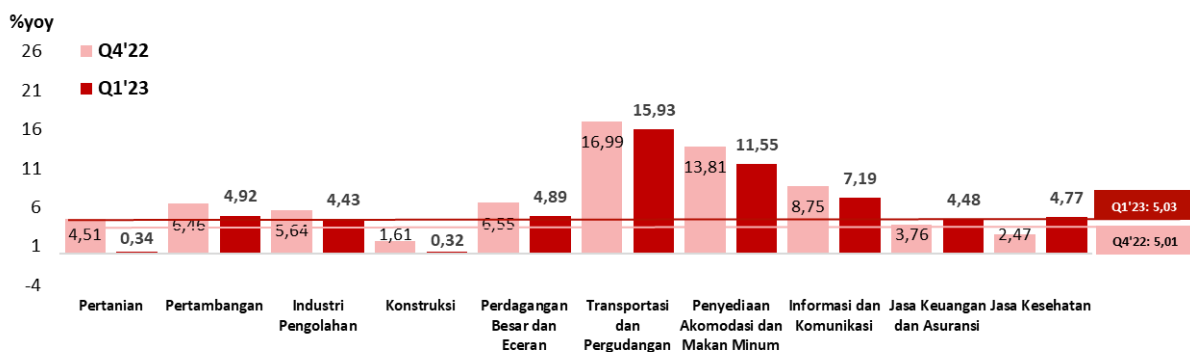
Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 2,11% (yoy), didorong utamanya oleh investasi kendaraan, mesin dan perlengkapan. Hal ini juga sejalan dengan naiknya nilai impor barang modal yang tumbuh 18,49% (yoy) yang menandakan tumbuhnya aktivitas kegiatan usaha sebagaimana ditunjukkan oleh indeks PMI Manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansi sebesar 51,9 pada Maret 2023. Selain itu, investasi bangunan juga masih tumbuh meski terbatas seiring masih berlanjutnya proyek pembangunan pemerintah.

Pengeluaran pemerintah juga tumbuh 3,99% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -4,77% (yoy). Meskipun program PC-PEN sudah tidak

dilanjutkan pada tahun 2023, namun belanja APBN tetap dilanjutkan untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan sektor pelayanan publik lainnya. Per 31 Maret 2023, realisasi belanja APBN sudah mencapai Rp518,7 triliun atau 16,9% dari pagu APBN. Capaian realisasi tersebut tumbuh 5,7% (yoy). Pemerintah pusat sudah membelanjakan Rp347,3 triliun, atau 15,5% dari total alokasi belanja APBN tahun 2023, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp166,9 triliun atau 16,7% dari pagu dan belanja non-KL sebesar Rp180,3 triliun atau 14,5% dari pagu.

Dilihat berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2023 utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian yang masing-masing tumbuh sebesar 4,43% (yoy), 4,89% (yoy) dan 4,92% (yoy). Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 15,93% (yoy) dan 11,55% (yoy) sejalan dengan berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat, naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional.

Grafik 10 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

Halaman ini sengaja dikosongkan

Boks 1.

Economic Overview: Risiko yang dihadapi Emerging Markets dalam Ketidakpastian Global dan Prospek Indonesia sebagai salah satu Emerging Markets terbesar di Dunia

Faktor Kunci Kinerja Emerging Markets....

Sebelum Pandemi Covid-19 melanda, *emerging markets* (EM) tercatat mengalami pertumbuhan yang jauh lebih pesat dibanding *developed markets* (DM). Berdasarkan klasifikasi *World Economics*, EM berkontribusi terhadap 50% PDB global dan 66% pertumbuhan PDB global pada 2012-2022. Pertumbuhan di EM utamanya didorong oleh empat faktor antara lain: 1) keuntungan demografis (jumlah populasi penduduk¹ dan rerata usia yang lebih muda) serta permintaan domestik yang tinggi; 2) keunggulan kompetitif (biaya produksi dan tenaga kerja yang lebih rendah); 3) EM merupakan penghasil komoditas utama global; dan 4) pemanfaatan utang yang diberikan oleh DM.

EM memainkan peranan vital dalam pasar perdagangan global selama dua dekade terakhir (terutama dipimpin oleh Tiongkok). Pada tahun 2022, EM menyumbang 44,18% dari total ekspor dan 39,10% dari total impor global. Selain berperan sebagai eksportir utama, EM juga merupakan produsen komoditas utama dunia seperti: minyak hewan dan nabati; barang manufaktur; bahan bakar mineral; peralatan mesin; dan sebagainya. Di satu sisi, EM mendapat *windfall profit* ketika harga komoditas meningkat. Namun demikian, volatilitas harga komoditas yang diikuti dengan peningkatan ketergantungan pada Utang Luar Negeri (ULN) untuk membiayai pembangunan telah mengakibatkan ketidakpastian yang tinggi pada EM, sehingga EM lebih rentan terhadap guncangan serta krisis ekonomi dan keuangan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun global.

EM menghadapi berbagai tantangan baru setelah pulihnya aktivitas ekonomi pasca Pandemi Covid-19...

Interaksi antara EM dengan DM tergolong substansial dan pasar keuangan global sudah semakin terintegrasi dan saling bergantung satu sama lain (saling terhubung). Beberapa negara EM telah meningkatkan porsi mereka terhadap perdagangan global dan menguatkan posisi mereka sebagai debitur dan kreditur. Selain itu, beberapa negara DM juga memiliki eksposur yang cukup signifikan pada EM. Dengan demikian, peristiwa buruk yang terjadi pada EM maupun DM dapat meningkatkan risiko secara mendadak dan memiliki dampak sistemik secara global serta memicu ketidakstabilan di sistem keuangan melalui transmisi sektor riil maupun finansial.

Risiko yang terkait dengan EM berhubungan dengan ketidakpastian makro ekonomi terutama volatilitas pasar komoditas dan pasar pendanaan asing. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dialami EM seketika merosot tajam akibat pembatasan aktivitas masyarakat (*lockdown*) selama Pandemi Covid-19. Ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak Pandemi Covid-19 menghadapi tantangan lain yaitu gangguan rantai pasok global, yang diperburuk oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, menimbulkan kelangkaan pasokan energi dan pangan sehingga menyebabkan inflasi melambung tinggi. Sebagai upaya untuk meredam tekanan inflasi, mayoritas Bank Sentral di DM segera mengambil langkah kebijakan moneter ketat dengan cara menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan. Hal tersebut membuat tekanan pada EM akibat penarikan dana oleh investor asing (*capital outflow*) dan mengakibatkan depresiasi mata uang domestik EM terhadap *hard currency* utamanya USD serta meningkatkan beban pembayaran Utang Luar Negeri (ULN). Selain itu, kebijakan pemerintah di beberapa EM saat pandemi Covid19 berfokus

¹ Jumlah populasi penduduk Pasar negara berkembang mendominasi secara global dengan pangsa sebesar 69,14%. Karakteristik demografis di Pasar negara berkembang pada umumnya berbentuk piramida ekspansif yaitu didominasi oleh kategori penduduk berusia muda.

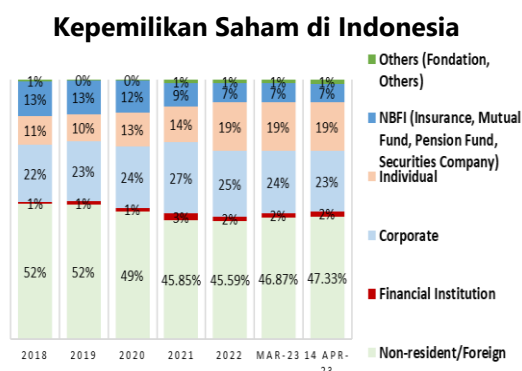
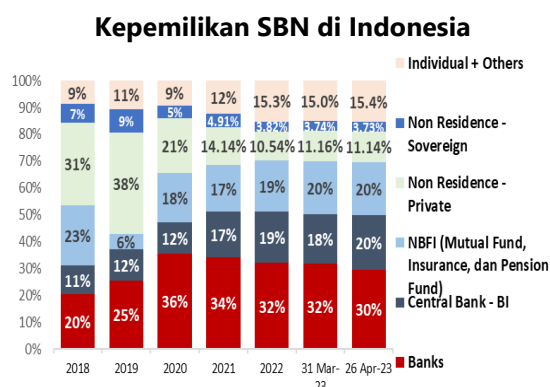
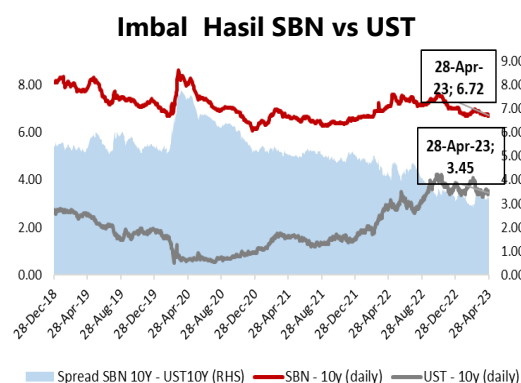
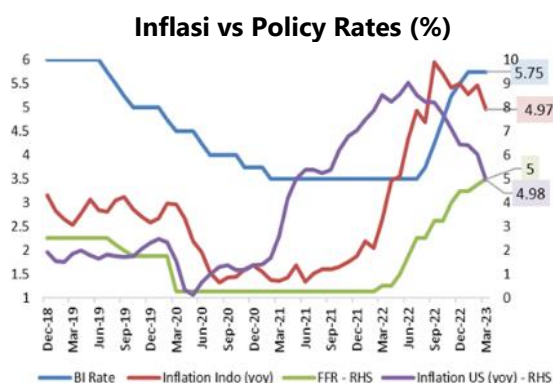
pada penyediaan layanan kesehatan dan sosial sehingga menghasilkan defisit anggaran yang lebih besar dan mengurangi ruang fiskal untuk mendukung perekonomian di masa mendatang.

Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi sektor perbankan di banyak EM. Secara khusus, faktor risiko utama termasuk (i) implikasi dari melemahnya permintaan global dan penurunan ekspor; (ii) kondisi yang tidak menguntungkan di pasar komoditas, termasuk volatilitas harga dan gangguan pasokan produksi; (iii) inflasi tinggi dengan latar belakang gangguan pasokan; (iv) pengetatan kebijakan moneter secara global; dan (v) meningkatnya biaya pinjaman. Faktor-faktor risiko tersebut juga dapat meningkatkan risiko kredit bank dan mengurangi profitabilitas.

Kebijakan Suku Bunga dan Kepemilikan Asing pada Instrumen Pasar Modal di Indonesia....

Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia menempuh langkah pengetatan kebijakan moneter untuk mengendalikan laju inflasi serta menjaga stabilitas nilai tukar mata uang akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi dan *volatile food*. Pertama, dengan cara menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) secara bertahap dari 3,5% menjadi 5,75% pada Januari 2023. Kedua, dengan cara menaikkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap dari 3,5% pada Februari 2022 menjadi 9,00% pada September 2022.

Kenaikan *policy rate* di Amerika Serikat juga diikuti oleh kenaikan *yield Fed Fund Rate* (FFR) yang memengaruhi tingginya volatilitas pasar keuangan AS. Pada pasar keuangan Indonesia, meskipun terjadi peningkatan BI7DRR namun *yield* (imbal hasil) SBN relatif stabil dibandingkan imbal hasil UST yang cenderung *volatile* mengikuti pergerakan FFR dan menyebabkan semakin menyempitnya *spread* antara *yield* UST dengan SBN. Dalam hal ini, terjaganya nilai pasar obligasi pemerintah selain didukung oleh Bank Indonesia juga didukung oleh industri perbankan yang memiliki peran vital dalam investasi SBN, dilatarbelakangi oleh melimpahnya likuiditas dari pendanaan yang mengalir di masa pandemi. Sementara itu, pasar saham cenderung juga mengalami tren kenaikan yang didorong oleh investor domestik. Aksi beli (*net buy*) investor domestik tersebut berdampak pada penurunan porsi kepemilikan investor asing pada saham dan SBN di Indonesia. Di tahun 2023, porsi kepemilikan asing pada SBN dan saham menjadi berkisar antara 15% dan 47%, menurun dibandingkan masa sebelum pandemi. Menurunnya ketergantungan pasar keuangan Indonesia terhadap dana pihak asing (*foreign fund*) menjadi salah satu penopang nilai pasar surat berharga utamanya SBN pada kondisi saat ini.



Sumber: OJK, BI, CEIC, Reuters, DJPPR

Langkah Kebijakan Fiskal untuk Meningkatkan Pendapatan Negara dan Menjaga Arus Modal di Indonesia....

Selama masa Pandemi Covid-19, anggaran Pemerintah Indonesia terfokus pada kesehatan dan jaminan sosial sehingga mengakibatkan defisit anggaran yang lebih besar. Seiring pemulihan ekonomi nasional yang disertai dengan pengetatan kebijakan moneter, Pemerintah mulai memangkas alokasi anggaran untuk subsidi sosial dan kesehatan lalu mengalihkan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan utang Pemerintah. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap PDB Indonesia yang secara gradual mengalami penurunan dari 38,08% pada tahun 2020 menjadi 31,83% pada 2022. Kondisi tersebut berimplikasi pada posisi Neraca Fiskal Konsolidasi Indonesia yang mencatatkan defisit sebesar 2,4% dari PDB Nominal pada Desember 2022.



Sumber: BI, Kementerian Keuangan

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan menjaga aliran modal, Pemerintah bersama Bank Sentral mengeluarkan beberapa kebijakan seperti:

1. Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli.
2. Normalisasi PPN untuk kendaraan.

Selama masa Pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan insentif pajak untuk barang-barang dan jasa-jasa antara lain atas PPN, Pajak Penghasilan Usaha, dan Pajak Impor (PMK No.28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019).

Dalam perkembangan terkini, Pemerintah menetapkan insentif berupa pengurangan PPN *electric vehicle* dari 11% menjadi 1% untuk pembelian mobil dan bus listrik yang berlaku mulai 1 April hingga 31 Desember 2023. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

3. Pemerintah akan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Salah satu ketentuan tersebut, antara lain, eksportir wajib memarkir DHE di bank-bank Indonesia minimal tiga bulan dengan besaran dijaga 30% dari total nilai ekspor.
4. Untuk mendorong penyerapan DHE dalam negeri, BI menerbitkan Term Deposit Instrumen Operasi Moneter untuk DHE yang berlaku efektif pada 1 Maret 2023.

Upaya Otoritas bersama Industri Perbankan dalam Memitigasi Risiko Ketidakpastian Ekonomi Global....

OJK bersama industri perbankan sepakat untuk menanamkan optimisme terhadap situasi global namun tetap mewaspadaai berbagai risiko yang dihadapi sektor keuangan. Hal ini didukung oleh manajemen risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank, pengawasan berbasis risiko dan upaya preventif yang diterapkan oleh OJK dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global yang masih berlanjut, serta kolaborasi antara Pemangku Kebijakan dan *stakeholders* untuk membuat bauran kebijakan yang tepat sasaran. Di samping itu, dukungan kepercayaan publik di tengah ketidakpastian juga berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selama ini, OJK dan industri perbankan melakukan *stress test* secara berkala dengan menggunakan berbagai skenario ekonomi makro seperti PDB, suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan indeks harga rumah. Ruang lingkup *stress test* ini meliputi risiko kredit, termasuk *relapse* kredit yang direstrukturisasi, dan risiko pasar. Pada tahun 2022, OJK telah beberapa kali melakukan *stress test* industri perbankan termasuk *stress test* kolaborasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan secara rutin memantau manajemen risiko perbankan, kerugian penurunan nilai, CAR, Posisi Devisa Neto, dan indikator perbankan lainnya untuk tujuan pengawasan perbankan. OJK juga melakukan *stress test* likuiditas secara berkala setidaknya satu tahun sekali dan menjalankan simulasi likuiditas terkait peningkatan giro wajib minimum pada awal tahun 2022.

Prospek Perekonomian dan Industri Perbankan Indonesia....

Saat ini, EM dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian seiring melemahnya permintaan global, tingginya laju inflasi di tengah gangguan rantai pasokan global, serta pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara yang menahan laju pertumbuhan ekonomi global. Kondisi ekonomi tersebut dapat memengaruhi industri perbankan di EM. Kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas mata uang domestik dan melawan inflasi, dapat menurunkan nilai aset, mengurangi profitabilitas bank dan meningkatkan risiko kredit. Sehubungan dengan beberapa kasus gagal bayar bank di AS dan Eropa (SVB, Signature, First Republic & Credit Suisse), masing-masing yurisdiksi memiliki eksposur yang berbeda-beda. Di Indonesia, eksposur bank asing terutama AS dan Eropa masih relatif sangat rendah dibandingkan dengan aset perbankan. Namun demikian, masih terdapat *scarring effect* yang masih perlu diwaspadai perbankan di Indonesia sebagai dampak sisa dari Pandemi Covid-19.

Sejak kegagalan beberapa bank di AS, Rupiah dan mata uang EM lainnya mulai menguat relatif terhadap dolar AS. Selain itu, ketergantungan pasar keuangan dan pasar saham di Indonesia terhadap investor asing juga sudah sangat menurun dibandingkan sebelum pandemi. Dengan pengalaman dan pelajaran dari krisis masa lalu, industri perbankan EM sejauh ini terbukti cukup tangguh.

Sebagian besar industri perbankan pada EM memiliki rasio modal Tier 1 yang lebih tinggi dari AS. Pada saat yang sama, rasio investasi (misalnya sekuritas *Treasury* AS) terhadap aset untuk bank di negara-negara EM lebih rendah daripada di AS. Dari perspektif jangka panjang, potensi pertumbuhan kredit konsumen dan korporasi di EM lebih besar daripada di pasar negara maju. Dalam hal ini, industri perbankan Indonesia terpantau memiliki rasio kecukupan modal dan rasio likuiditas yang relatif tinggi. Perbankan Indonesia juga masih memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan ekspansi kredit meskipun suku bunga kebijakan telah meningkat. Namun demikian, tetap perlu diwaspadai adanya risiko likuiditas apabila terjadi *capital outflow* secara berkelanjutan.

Risiko lain yang mengintai industri perbankan di Indonesia atas dampak lanjutan dari Pandemi Covid-19 adalah terkait normalisasi kebijakan restrukturisasi kredit yang akan berakhir pada 31 Maret 2024. Ketika kebijakan dinormalisasi secara penuh, terdapat risiko peningkatan kredit bermasalah, terutama bagi debitur yang belum pulih pasca pandemi. Untuk memperkuat ketahanan perbankan, OJK senantiasa mendorong perbankan memperkuat permodalan dan CKPN untuk menghadapi skenario pemburuan akibat kenaikan risiko kredit, meningkatkan *buffer* likuiditas untuk memitigasi meningkatnya risiko likuiditas, dan meningkatkan implementasi fungsi manajemen risiko secara keseluruhan.

Namun demikian, di tengah melemahnya kondisi ekonomi global, prospek Indonesia masih dinilai cukup cerah. Hal ini di antaranya didukung oleh langkah OJK melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum untuk mendorong bank nasional agar tidak hanya tangguh di lingkup domestik tetapi juga kompetitif pada skala regional dan global serta POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang mendukung transformasi dan akselerasi digital bagi bank tanpa mengabaikan aspek prudensial.

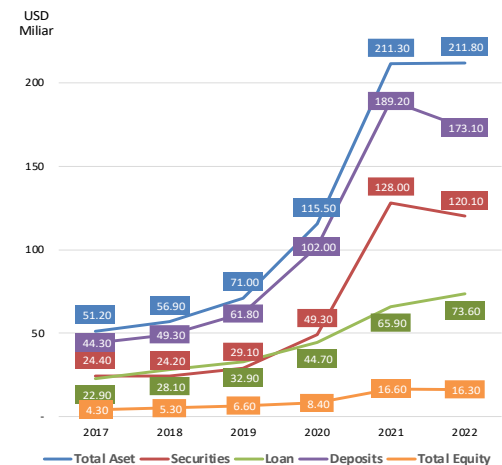
Boks 2.

Lesson Learned Krisis Bank Amerika Serikat (AS): Silicon Valley Bank (SVB) dan First Republic Bank (FRC)

Peningkatan skala usaha Silicon Valley Bank (SVB) tidak diimbangi dengan implementasi manajemen risiko yang memadai...

Pada Maret 2023, dunia dikejutkan dengan berita risiko gagal bayar salah satu bank komersial besar di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank (SVB). SVB termasuk 20 bank komersial terbesar di AS dengan nasabah utamanya Tech and Venture Capital (VC). Dalam waktu 3 tahun, terutama saat pandemi berlangsung (akhir 2019-2022), aset, kredit dan DPK SVB meningkat pesat. Peningkatan tersebut berasal dari VC teknologi yang *booming* di tahun 2020/2021, lalu ditempatkan sebagian besar pada surat-surat berharga (SSB) dengan durasi yang tinggi. Per Desember 2022, 60% di antara total aset SVB merupakan *securities*, sementara *loan* hanya sekitar 35% dari total aset, sementara bank mulai mengalami penurunan DPK yang signifikan.

Perkembangan Aset, DPK, dan Modal SVB



Sumber: SVB Financial Group Financial Statement, diolah

Salah satu penyebab utama kegagalan SVB adalah lemahnya manajemen risiko bank. Pada tahun 2018, limit penentuan bank sistemik domestik di AS (D-SIB) berubah dari sebelumnya bank dengan aset di atas USD50 miliar menjadi bank dengan aset di atas USD250 miliar, sehingga SVB dikeluarkan dari daftar bank D-SIB. Dengan dikeluarkannya SVB dari D-SIB, bank mendapatkan kelonggaran kewajiban pemenuhan likuiditas dan permodalan. Rencana pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga oleh The Fed (*tapering off*) telah diumumkan dan dapat diproyeksikan sejak tahun 2020 sehingga bank diharapkan dapat menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang sesuai apabila terjadi *taper tantrum* sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2013 yang menyebabkan kenaikan *yield* SSB dan penurunan nilai aset bank. Namun demikian, SVB yang mengalami kekosongan jabatan *Chief Risk Officer* dari April 2022 hingga Januari 2023, tidak melakukan mitigasi risiko maupun *hedging* untuk menurunkan eksposur risiko suku bunga untuk mengantisipasi kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR). Kegagalan SVB juga dipicu oleh beberapa faktor lain yang saling berkaitan, antara lain:

1. Concentration Risk

Sebagian besar dana SVB berasal dari sektor teknologi atau *start-up*, yang mendapatkan modal ventura tinggi saat pandemi dan sebagian besar ditempatkan pada SSB (*bonds*) jangka panjang yang mencerminkan *concentration risk* di sisi aset maupun liabilitas.

2. Liquidity Risk

Peningkatan FFR menyebabkan investor mulai menahan investasinya pada bidang teknologi dan mencari investasi yang lebih aman dan menguntungkan. Terhentinya pasokan modal dari investor menyebabkan perusahaan teknologi menarik dananya secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan operasional terutama mengingat perusahaan belum menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan kembali untuk modal kerja. Hal ini diperparah dengan timbulnya kepanikan di antara perusahaan modal ventura utama sehingga menarik simpanan mereka di bank.

3. Market Risk

Bank menempatkan dananya mayoritas dalam bentuk SSB berjangka panjang yang sensitif terhadap suku bunga, sehingga kenaikan FFR menyebabkan nilai wajar SSB tersebut mengalami penurunan

tajam. Untuk memenuhi kebutuhan dana akibat penarikan dana *start-up*, SVB menjual SSB dengan harga likuidasi yang rendah, hingga merealisasikan *loss* sebesar USD1,8 miliar.

4. *Reputational Risk*

- Komunikasi publik yang buruk, di mana manajemen SVB secara terbuka menyatakan bahwa SVB memerlukan suntikan modal dan tengah mengalami kerugian dalam portfolio AFS/FVOCI. Hal ini membuat isu terkait pemburukan kondisi SVB beredar dengan cepat di kalangan pemilik dana (*VC tech company*) melalui sosial media dan membuat kepanikan antara nasabah.
- Pelanggaran *market conduct - Insider trading transaction*, yaitu penjualan saham besar-besaran oleh SVB Financial Group CEO Greg Becker yang membuat panik nasabah SVB.
- Penurunan *rating* SVB pada 8 Maret 2023 oleh Moodys karena *unrealized loss*.

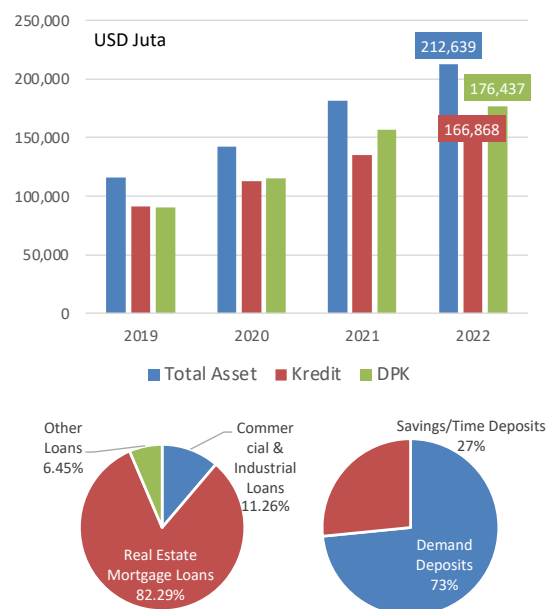
Pada 10 Maret 2023, SVB resmi di tutup dan diambil alih oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Kemudian pada 13 Maret 2023, FDIC membentuk bank penghubung atas nama Silicon Valley Bridge Bank, N.A. sebagai tindakan untuk melindungi semua depositan SVB.

Kepercayaan investor AS menurun terhadap bank yang memiliki profil serupa dengan SVB, salah satunya First Republic Bank (FRC)...

First Republic Bank (FRC) merupakan bank komersial dan penyedia jasa *wealth management* yang berkantor pusat di San Francisco, AS dan merupakan bank ke-14 terbesar di AS (per Desember 2022). Mayoritas saham FRC dimiliki oleh *institutional investor* (95,41%) dengan kepemilikan *Mutual Fund Holders* sebesar 45,65%.

Adapun kesamaan FRC dengan SVB, antara lain: (1) *Mid-size regional bank* yang terkonsentrasi pada *customer base* (*wealthy customer*), (2) Memiliki banyak *uninsured* DPK, (3) Memiliki *unrealized loss* cukup besar atas *holding* obligasi dan treasury, dan (4) Mengalami pertumbuhan pesat pada 3 tahun terakhir. Namun demikian, FRC memiliki porsi kredit yang jauh lebih besar dibanding SSB dengan konsentrasi cukup tinggi pada kredit *real estate/mortgage* dengan suku bunga rendah sehingga pendapatan bunganya tidak sesuai dengan kondisi suku bunga tinggi saat ini. Selain itu, sekitar 70% DPK FRC tidak dijamin dan FRC memiliki rasio hutang dan investasi jangka panjang terhadap DPK yang cukup tinggi sebesar 111%.

Perkembangan Aset, Kredit, dan DPK FRC



Sumber: <https://ir.firstrepublic.com>; diolah

Menyusul ditutupnya SVB, kepercayaan nasabah di AS menurun tajam terutama kepada bank yang memiliki kemiripan profil dengan SVB dan banyak depositan memindahkan dananya ke bank yang lebih besar. Untuk mencegah dampak serupa bangkrutnya SVB dan Signature Bank, 11 bank di AS mencoba menyelamatkan FRC dengan penempatan dana sebesar USD30 miliar ($\pm$ Rp461 triliun) pada 16 Maret 2023. Kesebelas bank tersebut akan menyimpan dananya di FRC selama minimal 120 hari. Namun demikian, depositan dan investor tetap khawatir akan prospek FRC ke depan dan penarikan DPK tetap terjadi.

Dampaknya, beberapa *rating agency* (S&P dan Fitch) menurunkan *credit rating* FRC menjadi "*junk*" meskipun bank besar telah mengumumkan suntikan dana kepada FRC, karena melihat adanya penurunan profil keuangan bank dan "*significant challenges*" dari ketergantungan FRC pada pendanaan jangka pendek dan berbiaya tinggi. FRC dalam *Earning Release* pada triwulan I-2023, mencatatkan *outflow* DPK yang signifikan sebesar 40,78% (ytd) menjadi USD104,5 miliar. FRC juga menangguhkan pembayaran dividen tunai triwulanan atas saham preferennya awal bulan ini. Sentimen negatif tersebut mendorong aksi penjualan saham besar-besaran yang menyebabkan saham FRC (NYSE: FRC) jatuh lebih dari 93% (ytd), atau

kontraksi 49,4% dalam sehari (25/4) setelah mengungkapkan para nasabah telah menarik lebih dari USD100 miliar simpanan atau sekitar Rp1.484 triliun pada triwulan I-2023.

Pada 1 Mei 2023, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengonfirmasi bahwa FRC adalah bank gagal dan akan diambil alih oleh JP Morgan Chase & Co (JPM).

Berkaca dari kasus yang terjadi pada SVB dan FRC, evaluasi terhadap manajemen risiko dan ketepatan strategi bank di tengah ketidakpastian global adalah vital bagi Perbankan...

Risiko Strategik: Bank seperti SVB dan FRC gagal melakukan penyesuaian strategi bisnis saat adanya pengetatan likuiditas, meskipun kondisi tersebut sudah dapat diprediksi sebelumnya.

- Bank perlu melakukan pengelolaan aset dan liabilitas yang baik berupa evaluasi dan penyesuaian strategi bank di saat berubahnya kondisi makro dan kebijakan moneter.

Risiko Konsentrasi: SVB dan FRC memiliki konsentrasi DPK pada *uninsured* deposit. Penyaluran dana SVB terkonsentrasi di SSB dengan durasi tinggi sedangkan FRC terkonsentrasi pada *mortgage loan* suku bunga rendah.

- Sekilas, SVB terlihat sangat aman dengan penyaluran dana yang sebagian besar pada SSB yang likuid dan bukan kredit, namun tingginya durasi SSB di saat kondisi suku bunga meningkat tajam menyebabkan penurunan nilai aset bank.
- Meskipun FRC memiliki risiko kredit yang rendah karena menyalurkan *mortgage* kepada *wealthy customer*, namun konsentrasi penyaluran kredit tersebut menyulitkan bank untuk mengubah strategi bisnis ketika terjadi perubahan suku bunga.

Risiko Pasar dan Rentabilitas: Peningkatan suku bunga acuan mempengaruhi profitabilitas bank. Bank mengalami *unrealized loss* dari penurunan nilai wajar SSB dan prospek rentabilitas yang buruk karena rendahnya suku bunga kredit dibandingkan suku bunga pasar.

- Bank harus secara proaktif memantau kondisi makro yang dapat memengaruhi kondisi market dan secara proaktif melakukan penyesuaian terhadap aset dan liabilitasnya.
- Pelaksanaan *solvency stress test* atas risiko pasar baik terhadap nilai wajar SSB maupun IRRBB.

Risiko Reputasi dan Risiko Likuiditas : FRC mengalami penarikan dana besar-besaran imbas dari defaultnya SVB yang menurunkan kepercayaan masyarakat.

- Pemantauan likuiditas melalui *liquidity stress test*
- Pentingnya pengelolaan informasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat

Halaman ini sengaja dikosongkan

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan I-2023 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan Rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi perbankan membaik terlihat dari kredit yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya bahkan melebihi pertumbuhan DPK. Selanjutnya, rentabilitas dan efisiensi perbankan juga tercatat meningkat tecermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan juga diiringi dengan penurunan risiko kredit pada bank umum.

1. Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan I-2023 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan Rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi perbankan membaik terlihat dari kredit yang tumbuh meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya bahkan melebihi pertumbuhan DPK. Selanjutnya, rentabilitas dan efisiensi perbankan juga tercatat meningkat tecermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan juga diiringi dengan perlambatan risiko kredit.

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum

Indikator	2022		2023	qtq		yoy	
	Mar	Des	Mar	Des '22	Mar '23	Mar '22	Mar '23
Total Aset (Rp Miliar)	10.131.460	11.113.315	10.979.992	5,97%	-1,20%	9,22%	8,38%
BUK	9.684.610	10.581.455	10.440.073	5,89%	-1,34%	9,02%	7,80%
BUS	446.850	531.860	539.919	7,46%	1,52%	13,65%	20,83%
Kredit (Rp milyar)	5.863.269	6.423.564	6.445.457	2,37%	0,34%	6,67%	9,93%
BUK	5.597.973	6.100.964	6.114.349	2,29%	0,22%	6,66%	9,22%
BUS	265.296	322.599	331.108	3,82%	2,64%	6,90%	24,81%
DPK (Rp Miliar)	7.481.675	8.153.590	8.005.579	6,62%	-1,82%	9,95%	7,00%
BUK	7.114.317	7.724.561	7.568.139	6,70%	-2,02%	9,70%	6,38%
BUS	367.358	429.029	437.440	5,14%	1,96%	15,04%	19,08%
- Giro (Rp Miliar)	2.188.067	2.546.160	2.435.690	13,15%	-4,34%	18,27%	11,32%
BUK	2.131.017	2.481.780	2.362.772	13,52%	-4,80%	18,18%	10,88%
BUS	57.050	64.381	72.919	0,28%	13,26%	21,78%	27,82%
- Tabungan (Rp Miliar)	2.434.465	2.615.185	2.541.308	3,56%	-2,82%	14,17%	4,39%
BUK	2.297.507	2.450.312	2.381.557	3,31%	-2,81%	13,97%	3,66%
BUS	136.957	164.873	159.751	7,43%	-3,11%	17,61%	16,64%
- Deposito (Rp Miliar)	2.859.143	2.992.245	3.028.580	4,20%	1,21%	1,31%	5,93%
BUK	2.685.793	2.792.469	2.823.810	4,15%	1,12%	0,74%	5,14%
BUS	173.350	199.775	204.770	4,94%	2,50%	11,10%	18,12%

Sumber: SPI Maret 2023

1.1 Aset Bank Umum

Aset Bank Umum tumbuh 8,38% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,22% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset seiring dengan perlambatan pertumbuhan DPK secara umum pada periode laporan. Jika dilihat dari jenis usaha bank, pertumbuhan aset BUK melambat sedangkan aset BUS tumbuh meningkat, seiring dengan arah pertumbuhan DPK pada kedua jenis bank.

Sebagian besar aset bank umum merupakan aset BUK dengan porsi 95,08%, sementara itu aset BUS memiliki porsi 4,92%. Meskipun masih cukup kecil, porsi aset BUS tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,41%. Porsi aset BUS yang jauh lebih kecil dibandingkan BUK menyebabkan tingginya pertumbuhan BUS belum dapat mendorong pertumbuhan Bank Umum secara total.

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan aset utamanya disebabkan oleh perlambatan kelompok Bank BUSN yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar (45,44%) yang tumbuh 8,41% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,85% (yoy). Di sisi lain, kelompok

Bank BUMN (porsi 41,48%) tumbuh 9,22% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,44% (yoy).

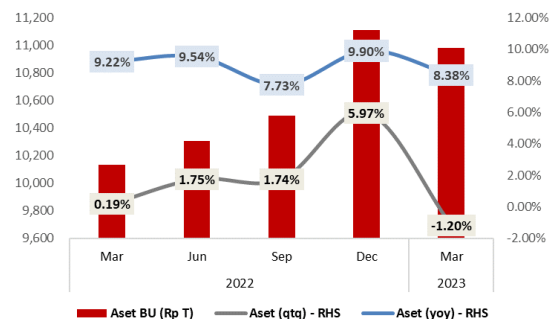
Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 Bank Umum terbesar mencapai 49,58% atau hampir setengah dari aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 Bank Umum terbesar mencapai 79,43% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum

Periode	Aset	
	CR4%	CR20%
Mar-22	49.73%	79.65%
Jun-22	49.38%	79.28%
Sep-22	49.57%	78.99%
Dec-22	50.55%	79.62%
Mar-23	49.58%	79.43%

Sumber: OJK

Grafik 11 Perkembangan Aset Bank Umum



Sumber: SPI Maret 2023

Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '22	Des '22	Mar '23		Des '22	Mar '23	Mar '22	Mar '23
BUMN	4.169.874	4.728.442	4.554.379	41,48%	9,38%	-3,68%	8,44%	9,22%
BUSN	4.602.409	4.923.416	4.989.682	45,44%	4,01%	1,35%	9,85%	8,41%
BPD	880.006	938.286	918.604	8,37%	3,78%	-2,10%	11,71%	4,39%
KCBLN	479.171	523.177	517.328	4,71%	-0,68%	-1,12%	5,66%	7,96%
Total	10.131.460	11.113.321	10.979.992	100%	5,97%	-1,20%	9,22%	8,38%

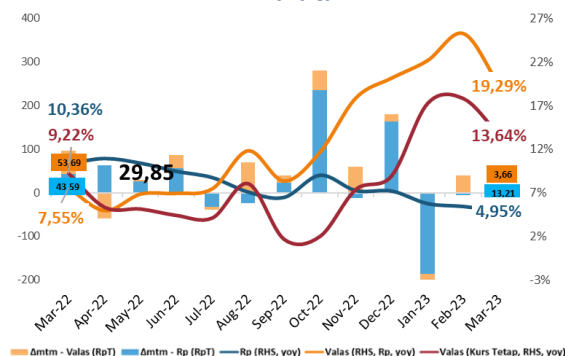
Sumber: SPI Maret 2023

1.2 Sumber Dana Bank Umum

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 72,91% dari total kewajiban Bank, diikuti pinjaman yang diterima (2,49%) dan kewajiban kepada bank lain (1,50%). Pada periode laporan, DPK Bank Umum tumbuh 7,00% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,95% (yoy).

Perlambatan DPK Bank Umum disebabkan oleh melambatnya DPK BUK pada periode laporan yang tumbuh 6,38% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 9,70% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan DPK BUS meningkat 19,08% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,04% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan DPK BUS tersebut tidak dapat mendorong ke atas pertumbuhan Bank Umum dikarenakan porsi DPK BUS yang kecil (5,46%).

Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta

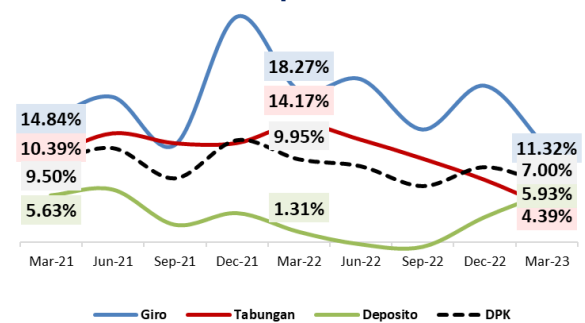


Sumber: SPI Maret 2023

Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada semua komponen DPK, utamanya pada komponen giro yang tercatat tumbuh cukup tinggi 11,32% (yoy), namun tetap melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,27% (yoy). Tabungan juga tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 4,39% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 14,17% (yoy).

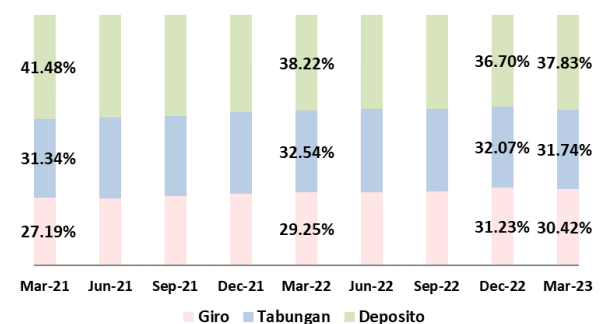
(yoy). Di sisi lain, deposito yang merupakan komponen DPK dengan porsi terbesar (37,83%) tumbuh 5,93% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,31% (yoy), seiring dengan peningkatan tren suku bunga deposito sejak setengah tahun terakhir.

Grafik 13 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen



Sumber: SPI Maret 2023

Grafik 14 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI Maret 2023

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (84,06%) tercatat tumbuh 4,95% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,36% (yoy). Sementara itu, berbanding terbalik dengan perlambatan pada DPK Rupiah, DPK Valas tercatat tumbuh tinggi 19,29% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,55% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas juga masih tercatat tumbuh tinggi sebesar 13,64% (yoy), dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 9,22% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUSN sebesar 45,30%, diikuti BUMN sebesar 42,36%. DPK BUSN tumbuh melambat menjadi 5,50% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,91% (yoy). BPD dan KCBLN juga tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,94% (yoy) dan 9,72% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,53% (yoy) dan 12,38% (yoy). Di sisi lain, DPK BUMN justru tumbuh 9,38% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,35% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan DPK BUMN belum dapat

menarik ke atas pertumbuhan DPK Bank Umum secara total.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 78,31%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (53,26%) diikuti Jawa Timur (8,74%) dan Jawa Barat (7,74%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Mar '22	Des '22	Mar '23		Des '22	Mar '23	Mar '22	Mar '23
BUMN	3.100.691	3.581.139	3.391.548	42,36	11,60%	-5,29%	6,35%	9,38%
BUSN	3.437.399	3.595.556	3.626.584	45,30	3,75%	0,86%	12,91%	5,50%
BPD	705.245	723.880	725.945	9,07	1,55%	0,29%	11,53%	2,94%
KCBLN	238.340	253.015	261.503	3,27	-2,75%	3,35%	12,38%	9,72%
Total	7.481.675	8.153.590	8.005.579	100	6,62%	-1,82%	9,95%	7,00%

Sumber: SPI Maret 2023

Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	Nominal Rp(M)			% Pangsa terhadap total DPK
	Mar '22	Des'22	Mar'23	
DKI Jakarta	3,895,805	4,373,922	4,263,376	53.26%
Jawa Timur	682,050	708,011	700,017	8.74%
Jawa Barat	605,961	632,629	619,465	7.74%
Jawa Tengah	369,110	384,849	382,486	4.78%
Sumatera Utara	303,258	306,773	303,429	3.79%
Total DPK 5 Provinsi	5,856,183	6,406,185	6,268,772	78.31%
Total DPK	7,481,675	8,153,590	8,005,579	

Sumber: SPI Maret 2023, diolah

1.3 Penggunaan Dana Bank Umum

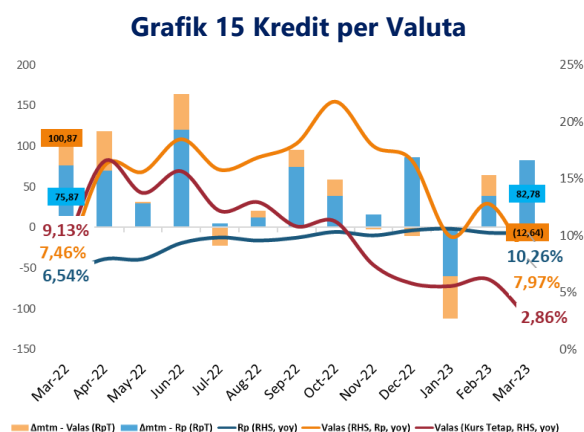
Sebagian besar dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank yaitu sebesar 58,70% terhadap total aset bank umum, diikuti penempatan

dalam bentuk surat berharga (17,52%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,93%).

Pada periode laporan, kredit bank umum tumbuh 9,93% (yoy), meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar

6,67% (yoy). Berdasarkan jenisnya, kredit BUK tumbuh 9,22% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 6,66% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan kredit BUK, pembiayaan BUS juga tumbuh tinggi 24,81% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,90% (yoy).

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,90%, sedangkan kredit valas sebesar 14,10%. Secara umum, pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 10,26% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,54% (yoy). Seiring dengan pertumbuhan kredit rupiah, kredit valas pada periode ini juga tercatat tumbuh 7,97% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,46% (yoy). Namun, jika menggunakan perhitungan kurs tetap, kredit valas tercatat tumbuh sebesar 2,86% (yoy), turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,13% (yoy) (Grafik 18).

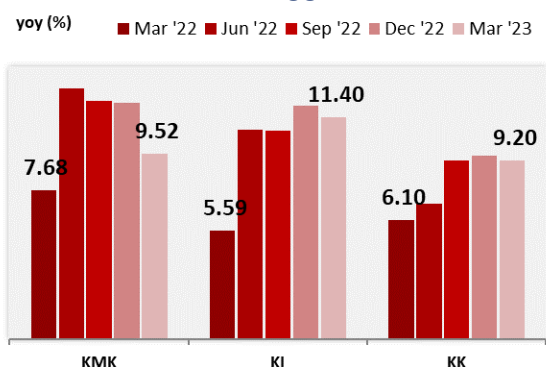


Sumber: SPI Maret 2023

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,12%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 45,23% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,89%, sedangkan kredit konsumsi (KK)

sebesar 27,88%. Kredit produktif tercatat tumbuh 10,21% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,90% (yoy). Peningkatan kredit produktif utamanya didorong oleh KMK yang tumbuh 9,52% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 7,68% (yoy). Selain itu, kredit konsumsi juga tercatat tumbuh meningkat menjadi 9,20% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,10% (yoy).

Grafik 16 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Maret 2023

1.4 Rentabilitas Bank Umum

Pada Maret 2023, rentabilitas Bank Umum tercatat membaik dengan meningkatnya ROA sebesar 58 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,19% menjadi 2,77%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 37,57% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 28,92% (yoy), sementara rerata total aset juga tercatat tumbuh namun melambat menjadi 8,81% (yoy) dari 10,67% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dari sisi margin, NIM tercatat meningkat 24 bps menjadi sebesar 4,77% dari 4,53% pada tahun sebelumnya. Peningkatan NIM seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 13,99% (yoy) lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan aset produktif yang tercatat sebesar 8,35% (yoy).

Sementara itu, efisiensi Bank Umum juga tercatat membaik tecermin dari rasio BOPO perbankan juga mengalami perbaikan

dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun 99 bps dari 80,35% menjadi 79,36%. Perbaikan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan operasional yang tumbuh tinggi 31,19% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -5,79% (yoy).

Tabel 6 Rasio Keuangan Bank Umum

Indikator	2022		2023		qtq		yoy	
	Mar	Des	Mar	Des '22	Mar '23	Mar '22	Mar '23	
CAR (%)	24,79	25,66	24,69	57	(97)	74	(10)	
BUK	24,85	25,60	24,63	43	(97)	81	(22)	
BUS	23,13	26,28	26,01	276	(27)	(132)	288	
ROA (%)	2,19	2,43	2,77	(8)	34	31	58	
BUK	2,20	2,45	2,80	(8)	35	33	60	
BUS	1,99	2,00	2,18	(7)	18	(7)	19	
NIM / NOM (%)	4,53	4,71	4,77	(6)	6	-	24	
BUK	4,62	4,80	4,86	(6)	6	-	24	
BUS	2,53	2,59	2,91	(7)	32	29	38	
BOPO (%)	80,35	78,65	79,36	149	71	(594)	(99)	
BUK	79,94	78,70	79,48	152	78	(650)	(46)	
BUS	86,76	77,28	75,78	61	(150)	466	(1.098)	
NPL / NPF Gross (%)	2,99	2,44	2,49	(34)	5	(18)	(50)	
BUK	3,00	2,44	2,50	(35)	6	(17)	(50)	
BUS	2,59	2,35	2,38					
NPL / NPF Net (%)	0,84	0,71	0,72	(6)	1	(18)	(12)	
BUK	0,84	0,71	0,73	(7)	2	(16)	(11)	
BUS	0,82	0,64	0,65					
LDR / FDR (%)	78,37	78,78	80,51	(327)	173	(241)	214	
BUK	78,69	78,98	80,79	(2.168)	181	(224)	210	
BUS	72,22	75,19	75,69	(96)	50	(559)	347	
AL/DPK (%)	32,11	31,20	28,91	385	(229)	(147)	(320)	
BUK	32,28	31,40	29,22	390	(218)	(128)	(306)	
BUS	28,82	27,56	23,55	288	(401)	(355)	(527)	
AL/NCD (%)	143,64	137,67	128,87	1.605	(880)	(1.089)	(1.477)	
BUK	143,81	137,90	129,65	1616	(825)	(1.024)	(1.416)	
BUS	139,81	133,23	114,10	1385	(1913)	(1.829)	(2.571)	

Sumber: SPI Maret 2023

Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum

Rasio	KBMI 1			KBMI 2		
	Mar '22	Des '22	Mar '23	Mar '22	Des '22	Mar '23
CAR	29.92%	30.93%	30.91%	36.30%	38.06%	36.14%
ROA	1.37%	0.77%	1.36%	0.93%	1.72%	2.20%
BOPO	87.57%	92.60%	89.08%	95.32%	92.40%	91.79%
NIM	4.18%	4.46%	4.69%	3.84%	4.18%	4.33%

Rasio	KBMI 3			KBMI 4		
	Mar '22	Des '22	Mar '23	Mar '22	Des '22	Mar '23
CAR	24.03%	24.38%	23.92%	21.30%	22.26%	20.97%
ROA	1.62%	1.68%	1.85%	3.00%	3.41%	3.73%
BOPO	82.32%	79.13%	79.68%	69.31%	67.26%	70.08%
NIM	3.67%	3.88%	3.83%	5.21%	5.29%	5.35%

Sumber: SPI Maret 2023

1.5 Permodalan Bank Umum

Pada periode laporan, baik ATMR Bank Umum maupun modal tercatat mengalami peningkatan. ATMR Bank Umum tumbuh 7,98% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,07% (yoy). Pertumbuhan ATMR utamanya disebabkan oleh tumbuhnya ATMR kredit sebesar 7,55% (yoy) dari 6,96% (yoy) pada tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit guna mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, ATMR Operasional dan ATMR Pasar juga tercatat tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 10,01% (yoy) dan 9,74% (yoy) dari 9,06% (yoy) dan -7,44% (yoy).

Sementara itu, modal tercatat tumbuh 8,49% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,68% (yoy). Pertumbuhan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal

menyebabkan CAR Bank Umum turun sebesar 6 bps (yoy) menjadi 25,60% dari tahun sebelumnya 25,66%. Meskipun turun, nilai CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBLN yaitu 57,31%. Tingginya CAR KCBLN tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBLN dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

Tabel 8 Komponen ATMR Bank Umum

Komponen ATMR (Rp T)	Mar '23	yoy		
		Mar '22	Des '22	Mar '23
ATMR Kredit	5.602	6,96%	10,17%	7,55%
ATMR Operasional	1.116	9,06%	8,62%	10,01%
ATMR Pasar	92	-7,44%	-13,57%	9,74%
Total ATMR	6.803	7,07%	9,67%	8,01%

Sumber: OJK

Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum berjalan cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh. Aset BPR dan BPRS melambat 7,47% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,33% (yoy) seiring dengan perlambatan DPK yang terjadi pada kedua komponen baik pada tabungan maupun pada deposito. Sementara itu, sejalan dengan perkembangan Bank Umum, penyaluran kredit/pembiayaan BPR dan BPRS juga tumbuh meningkat 10,87% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,25% (yoy).

Tabel 9 Rasio Keuangan BPR dan BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Mar '22	Des '22	Mar '23	Des '22	Mar '23	Mar '22
Total Aset (Rp Miliar)	187.870	202.458	201.911	↑ 4,03%	↓ -0,27%	↑ 9,33%
BPR	170.690	182.302	181.603	↑ 3,78%	↓ -0,38%	↑ 8,79%
BPRS	17.180	20.157	20.307	↑ 6,28%	↑ 0,75%	↑ 15,02%
Kredit/Pembiayaan (Rp milyar)	133.465	143.743	147.970	↑ 2,67%	↑ 2,94%	↑ 8,25%
BPR	120.826	129.295	132.625	↑ 2,57%	↑ 2,58%	↑ 7,53%
BPRS	12.639	14.448	15.345	↑ 3,57%	↑ 6,21%	↑ 15,59%
DPK (Rp Miliar)	131.239	211.625	140.682	↑ 56,02%	↓ -33,52%	↑ 11,40%
BPR	119.641	126.944	127.088	↑ 3,28%	↑ 0,11%	↑ 10,79%
BPRS	11.598	84.682	13.594	↑ 565,37%	↓ -83,95%	↑ 18,10%
Tabungan	40.327	44.513	42.531	↑ 5,93%	↓ -4,45%	↑ 13,42%
BPR	36.690	40.169	38.406	↑ 5,35%	↓ -4,39%	↑ 13,06%
BPRS	3.637	4.345	4.125	↑ 11,63%	↓ -5,04%	↑ 17,17%
Deposito	90.912	95.877	98.150	↑ 2,42%	↑ 2,37%	↑ 10,53%
BPR	82.951	86.775	88.682	↑ 2,35%	↑ 2,20%	↑ 9,82%
BPRS	7.961	9.102	9.469	↑ 3,02%	↑ 4,03%	↑ 18,52%

Sumber: OJK

2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Pada Maret 2023, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kredit tercatat tumbuh meningkat, diiringi dengan DPK yang juga masih tumbuh meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung

dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun tercatat turun dibanding tahun sebelumnya. Laba dan efisiensi juga meningkat, meskipun perlu diperhatikan adanya peningkatan risiko kredit pada periode laporan.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Mar '22	Des '22	Mar '23	Des '22	Mar '23	Mar '22
Total Aset (Rp milyar)	170.690	182.302	181.603	↑ 3,78%	↓ -0,38%	↑ 8,79%
Kredit (Rp milyar)	120.826	129.295	132.625	↑ 2,57%	↑ 2,58%	↑ 7,53%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	119.641	126.944	127.088	↑ 3,28%	↑ 0,11%	↑ 10,79%
- Tabungan (Rp milyar)	36.690	40.169	38.406	↑ 5,35%	↓ -4,39%	↑ 13,06%
- Deposito (Rp milyar)	82.951	86.775	88.682	↑ 2,35%	↑ 2,20%	↑ 9,82%
CAR (%)	38,17	30,76	32,73	(70)	197	415
ROA (%)	1,76	1,74	1,82	(4)	8	(11)
BOPO (%)	84,76	83,66	84,37	(28)	71	45
NPL Gross (%)	7,44	7,89	8,51	(23)	62	15
NPL Net (%)	4,93	5,23	5,77	(14)	54	2
LDR (%)	74,31	75,83	76,98	(42)	115	(550)
CR (%)	12,96	13,66	12,34	54	(132)	7

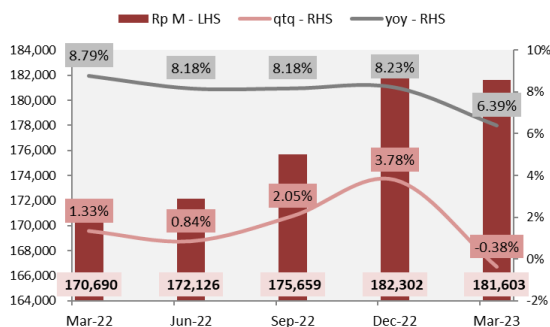
Sumber: SPI, Maret 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset BPR

Aset BPR pada Maret 2023 tumbuh 6,39% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,79% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan DPK yang juga melambat pada periode laporan.

Grafik 17 Perkembangan Aset BPR

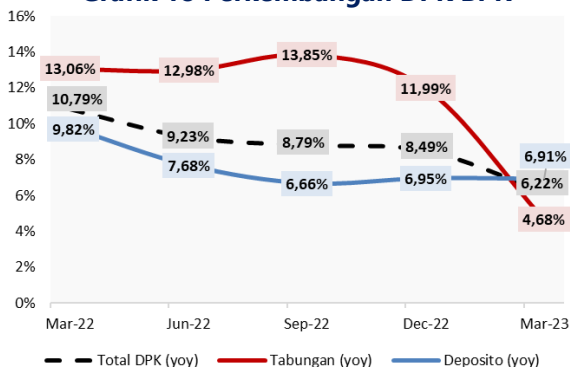


Sumber: SPI, Maret 2023

2.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Maret 2023 tumbuh 6,22% (yoy) menjadi Rp127,09 triliun, melambat dibandingkan Maret 2022 yang tumbuh sebesar 10,79% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen, namun utamanya disebabkan oleh komponen deposito (porsi: 69,78%) yang tumbuh 6,91% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,82% (yoy). Sejalan dengan deposito, tabungan (porsi: 30,22%) tercatat tumbuh 4,68% (yoy), juga melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 13,06% (yoy).

Grafik 18 Perkembangan DPK BPR



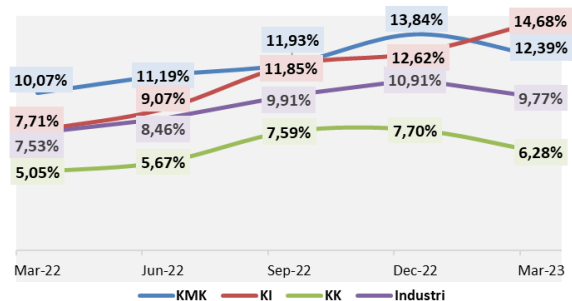
Sumber: SPI Maret 2023

2.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit pada Maret 2023 tumbuh 9,77% (yoy), meningkat dibandingkan 7,53% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (55,61%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (47,60%) dan Kredit Investasi/KI (8,01%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (44,39%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh semua jenis penggunaan dimana KMK tumbuh 12,39% (yoy) dari 10,07% (yoy), sementara KI tercatat tumbuh 14,68% (yoy) dari 7,71% (yoy). Sejalan dengan peningkatan kredit produktif, kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 6,28% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,05% (yoy).

Grafik 19 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI, Maret 2023

2.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Maret 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari ROA yang naik menjadi 1,82% atau naik 6 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,76%).

Sejalan dengan peningkatan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat meningkat, tecermin dari turunnya rasio BOPO sebesar

39 bps menjadi 84,37% dari 84,76% pada tahun sebelumnya.

2.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko

yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu sebesar 32,73%, meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 38,17%.

3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan I-2023 tumbuh cukup baik dengan aset, dan pembiayaan BPRS yang masih tercatat tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 18,20% (yoy), dan 21,41% (yoy). DPK BPRS juga masih tercatat tumbuh dua digit sebesar 17,21% (yoy). Namun demikian, perlu diperhatikan risiko pembiayaan BPRS

tercatat sedikit meningkat ditandai dengan peningkatan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tecermin pada permodalan yang masih cukup baik dan meskipun turun dibanding tahun sebelumnya. Efisiensi BPRS juga tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 11 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Mar '22	Des '22	Mar '23	Des '22	Mar '23	Mar '22	Mar '23
Total Aset (Rp Miliar)	17,180	20,157	20,307	↑ 6.28%	↑ 0.75%	↑ 15.02%	↑ 18.20%
Pembiayaan (Rp Miliar)	12,639	14,448	15,345	↑ 3.57%	↑ 6.21%	↑ 15.59%	↑ 21.41%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	11,598	13,446	13,594	↑ 5.65%	↑ 1.10%	↑ 18.10%	↑ 17.21%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3,637	4,345	4,125	↑ 11.63%	↓ -5.04%	↑ 17.17%	↑ 13.43%
- Deposito iB (Rp Miliar)	7,961	9,102	9,469	↑ 3.02%	↑ 4.03%	↑ 18.52%	↑ 18.94%
CAR (%)	24.09	24.42	22.78	68	(164)	11	(131)
ROA (%)	1.74	1.92	1.70	10	(22)	(7)	(4)
BOPO (%)	86.03	86.02	85.69	(49)	(33)	(314)	(34)
NPF Gross (%)	7.05	5.91	7.12	(96)	121	(102)	7
FDR (%)	108.98	107.45	112.88	(216)	543	(236)	390

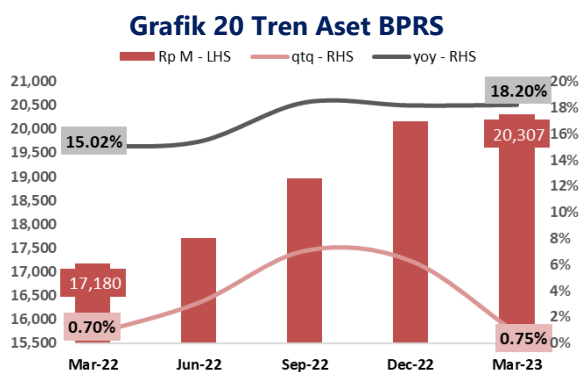
Sumber: SPS Maret 2023

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPRS

Pada Maret 2023, aset BPRS tercatat sebesar Rp20,31 triliun atau tumbuh 18,20% (yoy), meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,02% (yoy).

Sebagian besar BPRS memiliki total aset >Rp100 Miliar (161 BPRS). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana jumlah BPRS dengan total aset pada kelompok ini sebanyak 155 BPRS.



Sumber: SPS Maret 2023

3.2 Sumber Dana BPRS

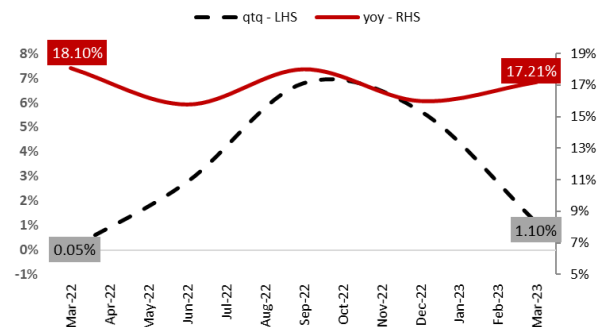
Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp13,59 triliun. Pada Maret 2023, DPK BPRS tumbuh 17,21% (yoy), turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,10% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad Mudharabah yakni 69,65% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (32,15% atau senilai Rp4,37 triliun). Namun demikian, Deposito iB tenor 12 bulan berkontraksi -2,31% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 22,67% (yoy).

Secara spasial, DPK BPRS sebagian besar berada di Jawa (74,67%) dan Sumatera (15,66%). DPK BPRS terbesar terpusat di Jawa Barat yang tumbuh 18,25% (yoy),

meningkat dibanding tahun sebelumnya 14,04% (yoy).

Grafik 21 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Maret 2023

3.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Maret 2023, pembiayaan BPRS mencapai Rp15,34 triliun, tumbuh meningkat sebesar 21,41% (yoy) dari 15,59% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara spasial, Pembiayaan BPRS sebagian besar berada di Jawa (75,05%) dan Sumatera (16,25%). DPK BPRS terbesar terpusat di Jawa Barat yang tumbuh 22,43% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya 18,52% (yoy).

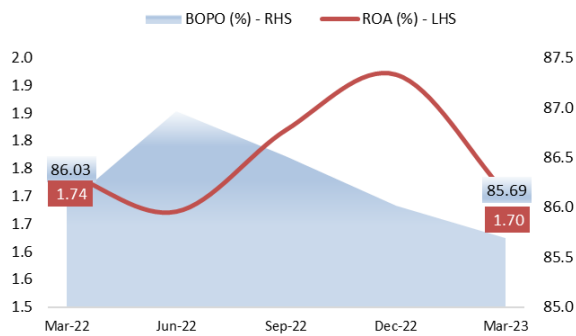
Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 57,73% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 45,46%) tumbuh tinggi 31,18% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,48% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan konsumtif juga tumbuh melambat 14,92% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 21,05% (yoy).

3.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat turun tecermin dari rasio ROA turun 4 bps menjadi 1,70% dari 1,74% pada

tahun sebelumnya. Sementara itu, efisiensi BPRS membaik tecermin dari BOPO yang turun 34 bps menjadi 85,69%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 86,03%.

Grafik 22 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Maret 2023

3.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR sebesar 22,78%, meskipun turun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 24,09%. Perlambatan CAR didorong oleh turunnya modal BPRS yang lebih besar dari penurunan ATMR BPRS. Meski demikian, CAR BPRS tersebut cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS, atau masih jauh di atas *threshold*.

3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan I-2023, penyaluran kredit/pembiayaan perbankan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan naiknya permintaan kredit mengikuti perbaikan keyakinan konsumen dan aktivitas usaha. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan pada triwulan ini berjalan utamanya didorong oleh kenaikan pada sektor rumah tangga, perantara keuangan, serta pertambangan dan penggalian.

A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan bank umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan I-2023 tumbuh 9,93% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (6,67%, yoy). Secara triwulanan, kredit juga tumbuh 0,34% (qtq), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (2,37%, qtq). Pertumbuhan

kredit yang masih tetap terjaga positif ini antara lain didorong oleh permintaan kredit yang kian membaik sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga yang disertai menurunnya persepsi risiko kredit. Adapun perlambatan kredit di awal tahun merupakan tren *seasonal* setelah kredit selalu tumbuh tinggi di akhir tahun.

Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Mar '22	Des '22	Mar '23	Des '22	Mar '23	Mar '22	Mar '23	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	423,89	458,32	462,30	2,46%	0,87%	8,55%	9,06%	7,17%
2	Perikanan	18,97	19,73	19,58	0,97%	-0,74%	14,98%	3,20%	0,30%
3	Pertambangan dan Penggalian	165,41	237,39	237,22	7,84%	-0,07%	31,90%	43,41%	3,68%
4	Industri Pengolahan	971,01	1.067,01	1.034,11	1,86%	-3,08%	8,66%	6,50%	16,04%
5	Listrik, gas dan air	156,59	162,33	151,46	1,10%	-6,70%	-8,07%	-3,28%	2,35%
6	Konstruksi	373,75	396,58	403,52	2,51%	1,75%	0,08%	7,97%	6,26%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	999,46	1.043,91	1.052,20	-0,36%	0,79%	6,25%	5,28%	16,32%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	122,19	123,62	122,70	0,83%	-0,75%	2,90%	0,42%	1,90%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	298,94	313,05	303,26	-1,86%	-3,13%	7,79%	1,45%	4,71%
10	Perantara Keuangan	236,09	305,79	318,21	12,47%	4,06%	12,56%	34,78%	4,94%
11	Real Estate	272,59	314,58	318,86	3,25%	1,36%	5,65%	16,97%	4,95%
12	Administrasi Pemerintahan	33,86	43,83	42,80	18,27%	-2,35%	7,85%	26,41%	0,66%
13	Jasa Pendidikan	14,63	14,89	14,89	1,13%	-0,05%	8,12%	1,74%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,97	31,52	32,31	5,80%	2,50%	-1,08%	15,51%	0,50%
15	Jasa Kemasyarakatan	98,05	114,67	130,95	2,22%	14,20%	6,22%	33,56%	2,03%
16	Jasa Perorangan	3,83	3,98	3,97	-1,34%	-0,39%	27,72%	3,66%	0,06%
17	Badan Internasional	0,34	0,02	0,02	75,96%	14,17%	-8,74%	-92,68%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas	-	-	-	-	1,00	-100,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.416,84	1.524,48	1.546,49	2,58%	1,44%	6,94%	9,15%	23,99%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	228,86	247,85	250,60	1,92%	1,11%	1,19%	9,50%	3,89%
Industri		5.863	6.424	6.445	2,37%	0,34%	6,67%	9,93%	100%

Sumber: SPI Maret 2023

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 23,99%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 9,15% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,94% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 7,34% (yoy) khususnya untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 9,00% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk kepemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh tinggi sebesar 15,43%, membaik dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,81% (yoy), didorong oleh pertumbuhan pemilikan mobil roda empat yang tumbuh 19,28% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi.

Untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan pertumbuhan penyaluran kredit tertinggi adalah perantara keuangan yang tumbuh 34,78% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 12,56% (yoy). Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh subsektor perantara keuangan lainnya (non-bank) yang tumbuh 38,78% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,34% (yoy), naik pada *leasing* maupun selain *leasing*.

Sektor ekonomi pertambangan dan penggalan juga tumbuh tinggi 43,41% (yoy) dari tahun sebelumnya 31,90% (yoy), didorong oleh pertumbuhan di subsektor pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi serta perusahaan tenaga panas bumi yang tumbuh tinggi 120,39% (yoy) dari tahun sebelumnya yang juga sudah tumbuh tinggi 82,55% (yoy).

Kredit sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 16,97% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang

tumbuh 5,65% (yoy). Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan pada subsektor real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama yang tumbuh tinggi 16,28% (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,64% (yoy).

Sementara itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 16,32%) tercatat sedikit melambat, tumbuh 5,28% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,25% (yoy). Perlambatan pada sektor ini antara lain disebabkan oleh terkontraksinya kredit perdagangan dalam negeri berupa beras. Namun demikian beberapa subsektor masih tumbuh cukup tinggi meskipun belum mampu menarik ke atas pertumbuhan sektor ini, di antaranya perdagangan besar mesin, suku cadang dan perlengkapannya yang masih tumbuh tinggi 47,63% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 41,51% (yoy). Penjualan mobil juga tumbuh tinggi 13,99% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -2,17% (yoy).

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 16,04%) juga tercatat melambat. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 6,50% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,66% (yoy). Perlambatan pada sektor ini disebabkan terkontraksinya beberapa subsektor di antaranya industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani (terkontraksi -4,21%, yoy dari 23,11%, yoy pada tahun sebelumnya), dan industri karet dan barang dari karet (terkontraksi makin dalam menjadi -21,98%, yoy dari -4,75%, yoy). Namun demikian, beberapa subsektor juga masih menunjukkan pertumbuhan yang baik. Industri kimia dan

barang-barang dari bahan kimia tumbuh 11,64% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 1.24% (yoy) didorong oleh pertumbuhan industri pupuk. Selain itu, industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya juga tumbuh 13,59% (yoy) dari 9,76% (yoy) pada tahun sebelumnya didorong oleh tingginya penyaluran kredit ke industri bubur kertas (pulp), kertas dan karton.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup

besar dengan porsi 7,17% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 9,06% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,55% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 8,96% (yoy), utamanya pada subsektor peternakan yang tumbuh 32,98% (yoy) serta perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 2,12% (yoy).

2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)

Pada triwulan I-2023, distribusi penyaluran kredit perbankan berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 67,84% dan 14,20%. Penyaluran kredit pada wilayah Jawa tercatat naik cukup signifikan yakni tumbuh 10,60% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,49% (yoy). Demikian halnya dengan penyaluran kredit pada wilayah Sumatera yang meningkat dari triwulan I-2022 sebesar 6,17% (yoy) menjadi 7,71% (yoy).

Penyaluran kredit di wilayah Jawa didominasi oleh provinsi DKI Jakarta dengan porsi 45,03% dan tumbuh 12,12% (yoy) meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,81% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit di DKI Jakarta utamanya ditopang oleh sektor perantara keuangan yang naik Rp76,56 T atau tumbuh signifikan dari 14,27% (yoy) menjadi 35,79% (yoy) pada triwulan I-2023. Adapun pertumbuhan kredit perantara keuangan utamanya terdapat pada subsektor perantara keuangan non bank-*leasing*. Hal tersebut sejalan dengan

hasil Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Maret 2023 yang dilakukan oleh Bank Indonesia bahwa mayoritas rumah tangga memilih koperasi dan *leasing* sebagai preferensi alternatif sumber pembiayaan.

Sementara itu, penyaluran kredit di wilayah Sumatera didominasi oleh provinsi Sumatera Utara dengan porsi 27,31%. Penyaluran kredit pada Provinsi Sumatera Utara meningkat Rp6,51 triliun atau tumbuh positif sebesar 2,68% (yoy) meskipun melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,32% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit di Sumatera Utara utamanya ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian yang naik Rp3,92 T atau tumbuh tinggi 143,42% (yoy) meski melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya 565,10% (yoy).

Dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran kredit pada Pulau Kalimantan tumbuh tertinggi yaitu dari 9,24% (yoy) menjadi 14,86% (yoy) meskipun porsinya hanya sebesar 6,64%. Penyaluran kredit di Pulau ini sebagian besar disalurkan pada provinsi

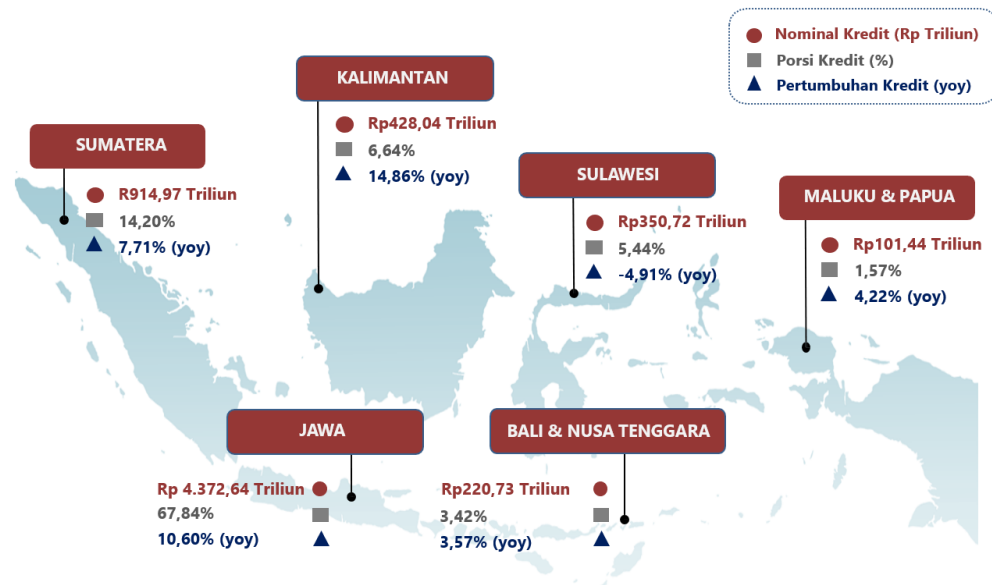
Kalimantan Timur dengan porsi 42,33% dan tumbuh 18,35% (yoy) meningkat dari 15,97% (yoy) tahun lalu. Pertumbuhan kredit di Kalimantan Timur utamanya ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian yang naik Rp8,16 triliun atau tumbuh 33,41% (yoy) meski melambat dari tahun lalu 66,86% (yoy). Adapun pertumbuhan kredit sektor pertambangan dan penggalian utamanya terdapat pada subsektor pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara. Sebagaimana diketahui, sektor pertambangan merupakan pengungkit kinerja ekspor di Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, penyaluran kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) juga tumbuh meningkat dari 3,13% (yoy) menjadi 3,57% (yoy). Penyaluran kredit di wilayah Bali Nusra didominasi oleh provinsi Bali dengan porsi 47,97% dan tumbuh relatif stabil 1,86% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 1,84% (yoy). Pertumbuhan kredit di Bali utamanya ditopang oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan yang naik Rp800 miliar atau tumbuh 29,27% (yoy). Hal ini seiring dengan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat

dan meningkatnya aktivitas pariwisata serta pendukung pariwisata di Bali.

Sementara itu, wilayah Papua dan Maluku mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit yang melambat dari 15,77% (yoy) menjadi 4,22% (yoy). Penyaluran kredit di wilayah Papua dan Maluku didominasi oleh provinsi Papua dengan porsi 37,91% yang berkontraksi -3,83% (yoy) dari tahun lalu tumbuh sebesar 21,99% (yoy). Penurunan penyaluran kredit provinsi Papua utamanya terjadi pada sektor pertambangan sebesar Rp4,32 triliun atau berkontraksi -98,90% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh turunnya hasil tambang di Papua karena adanya banjir dan longsor.

Di sisi lain, penyaluran kredit pada wilayah Sulawesi mencatatkan kontraksi -4,91% (yoy) dari 24,94% (yoy) dengan penurunan nominal kredit sebesar Rp18,11 triliun. Penurunan nominal kredit di wilayah ini didorong oleh turunnya kredit di provinsi Sulawesi Barat (porsi: 4,36%) yang berkontraksi -75,99% (yoy). Penyaluran kredit Provinsi Sulawesi Barat utamanya berkontraksi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar -81,69% (yoy) dengan penurunan nominal kredit sebesar Rp12,97 triliun.

Grafik 23 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial)

Sumber: LBUT, diolah

Tabel 13 Porsi Penyaluran Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)

Sektor Ekonomi	Porsi					
	Pulau Jawa	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku
Lapangan Usaha						
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	3,32%	17,53%	25,87%	7,08%	5,51%	7,78%
Perikanan	0,22%	0,37%	0,33%	0,93%	0,49%	0,81%
Pertambangan dan Penggalian	2,15%	3,68%	14,10%	4,60%	8,90%	4,50%
Industri Pengolahan	18,19%	15,63%	6,73%	7,20%	3,16%	9,56%
Listrik, Gas, dan Air	2,48%	2,02%	1,65%	4,09%	0,94%	0,07%
Konstruksi	7,59%	3,68%	3,78%	3,74%	2,55%	2,85%
Perdagangan Besar dan Eceran	15,97%	16,24%	13,09%	19,93%	22,83%	17,70%
Penyediaan Akomodasi dan PMM	1,69%	1,37%	1,04%	1,76%	10,49%	2,07%
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,96%	2,22%	2,51%	1,34%	1,31%	2,87%
Perantara Keuangan	7,09%	0,17%	0,29%	0,36%	0,28%	0,10%
Real Estate	6,25%	2,04%	2,38%	2,38%	1,34%	1,74%
Administrasi Pemerintahan	0,93%	0,02%	0,08%	0,09%	0,10%	0,73%
Jasa Pendidikan	0,26%	0,23%	0,09%	0,18%	0,23%	0,02%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55%	0,51%	0,14%	0,29%	0,67%	0,17%
Jasa Kemasyarakatan	2,23%	1,29%	1,80%	2,00%	2,30%	1,80%
Jasa Perorangan	0,05%	0,07%	0,03%	0,09%	0,12%	0,43%
Badan Internasional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya						
Rumah Tangga	21,55%	28,84%	25,22%	35,25%	30,26%	40,46%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,51%	4,08%	0,86%	8,68%	8,51%	6,35%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ket: Shading hijau menunjukkan lima sektor dengan porsi terbesar di wilayah tersebut

Sumber: LBUT, diolah

3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan I-2023, kredit/pembiayaan UMKM tumbuh 8,63% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,00% (yoy). Meski demikian, porsi

penyaluran kredit/pembiayaan UMKM per Maret 2023 tercatat sebesar 21,07% terhadap total kredit/pembiayaan bank

umum, meningkat dari posisi Desember 2022 sebesar 21,00%.

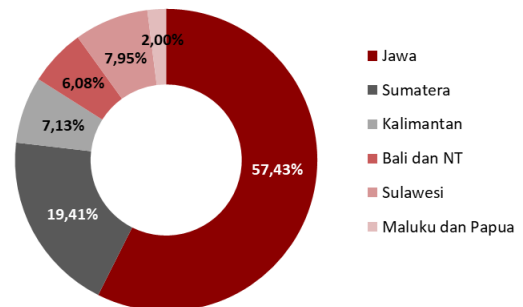
Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 48,63%) yang tumbuh 6,92% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 16,72% (yoy) sehingga mendorong ke bawah pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (16,07%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 23,25% (yoy), juga melambat dari 32,19% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Meskipun kredit UMKM melambat, kualitas kredit/pembiayaan UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% dan tercatat turun dari tahun sebelumnya 4,00% menjadi 3,72%. Perbaikan rasio NPL utamanya terdapat pada sektor konstruksi dan real estate yang masing-masing menurun dari 13,95% dan 6,02% menjadi 11,38% dan 4,00%. Meski demikian, perlu diperhatikan adanya kenaikan nominal NPL UMKM sektor perdagangan besar dan eceran disertai kenaikan rasio NPL dari tahun sebelumnya 3,81% menjadi 3,97%.

Secara spasial, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 57,43%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit/pembiayaan UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,16%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh sebesar 20,59% (yoy), meskipun dengan

porsi yang kecil hanya sebesar 1,05%. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (14,92%), tumbuh 9,18% (yoy) meskipun melambat dari tahun sebelumnya sebesar 17,14% (yoy).

Grafik 24 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM



Sumber: SPI Maret 2023

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM disalurkan oleh BUMN (63,31%) dan BUSN (29,92%). Pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM kedua kelompok bank tersebut masing-masing tumbuh sebesar 10,69% (yoy) dan 3,62% (yoy), meski melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 21,97% (yoy) dan 4,04% (yoy). Kredit UMKM kelompok BPD tumbuh 13,16% (yoy) meningkat dari tahun lalu sebesar 10,96% (yoy). Di sisi lain, kredit/pembiayaan UMKM kelompok Bank Asing masih berkontraksi -12,60% (yoy) namun sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam -52,44% (yoy).

Terkait dengan penyaluran kredit/pembiayaan UMKM dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi penyaluran KUR selama tahun 2023 sampai dengan 24 Maret 2023 tercatat sebesar Rp21,75 triliun (5,24% dari target tahun 2023 sebesar Rp415,22 triliun) dan diberikan kepada 346.203

debitur. Berdasarkan jenisnya, sebagian besar KUR disalurkan kepada KUR Mikro sebesar Rp11,54 triliun (53,07%), diikuti KUR Kecil Rp9,80 triliun (45,06%), KUR Super Mikro Rp404,06 miliar (1,86%), dan KUR PMI Rp4,13 miliar (0,01%).

Kebijakan KUR tahun 2023 kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19, antara lain: (i)

suku bunga KUR kembali ke 6% karena tambahan subsidi bunga/margin KUR sebesar 3% tidak dilanjutkan; (ii) kembalinya target penyaluran KUR sektor produksi sebesar 60%; (iii) kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil menjadi maksimal Rp500 juta; dan (iv) memperpanjang kebijakan restrukturisasi KUR s.d Maret 2024.

B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan BPR dan BPRS pada triwulan I-2023 tumbuh 10,87% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 8,25% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, salah satu penyaluran kredit/pembiayaan terbesar antara lain disalurkan ke sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel dengan porsi 22,43%. Kredit/pembiayaan pada sektor ini tumbuh sebesar 12,13% (yoy), meningkat dari 5,22% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran ke sektor bukan lapangan usaha - rumah tangga juga

cukup besar dengan porsi 12,41% dan tumbuh cukup tinggi sebesar 16,34% (yoy) meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 13,94% (yoy). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada kedua sektor tersebut antara lain sejalan dengan naiknya optimisme keyakinan konsumen dan mobilitas masyarakat yang mendorong permintaan konsumsi serta pariwisata. Hal ini juga tecermin pada tumbuhnya kredit/pembiayaan pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 32,25% (yoy), jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,71% (yoy).

Tabel 14 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)		qtq		yoy		Porsi
		Mar'22	Des'22	Mar'23	Des'22	Mar'23	Mar'22	
1	Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	8.060	9.140	9.575	7,94%	4,76%	16,18%	6,47%
2	Perikanan	484	609	614	10,51%	0,91%	-5,55%	0,42%
3	Pertambangan dan Penggalian	817	1.010	1.115	6,92%	10,43%	24,01%	0,75%
4	Industri Pengolahan	3.515	4.269	4.543	6,07%	6,41%	28,25%	3,07%
5	Listrik, Gas dan Air	179	189	220	11,49%	16,01%	18,35%	0,15%
6	Konstruksi	6.401	8.118	8.467	6,16%	4,30%	22,54%	5,72%
7	Perdagangan, Restoran dan Hotel	29.596	32.052	33.186	3,01%	3,54%	5,22%	22,43%
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3.244	3.963	4.290	7,01%	8,24%	7,71%	2,90%
9	Perantara Keuangan	1.178	1.640	1.834	9,09%	11,83%	58,83%	1,24%
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa	5.731	6.364	6.608	3,53%	3,84%	10,55%	4,47%
11	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	284	236	225	-5,53%	-4,70%	204,04%	0,15%
12	Jasa Pendidikan	421	426	429	5,49%	0,78%	15,97%	0,29%
13	Jasa Sosial/Masyarakat	12.089	11.223	11.258	-1,27%	0,31%	41,76%	7,61%
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	373	259	241	-11,92%	-6,99%	-56,42%	0,16%
15	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	56	3	8	-87,39%	116,47%	-97,96%	0,01%
16	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	15.783	17.661	18.362	3,98%	3,97%	13,94%	12,41%
17	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	45.254	46.581	46.994	0,39%	0,89%	3,90%	31,76%
Total		133.465	143.743	147.970	2,67%	2,94%	8,25%	100%

Sumber: SPI dan SPS Maret 2023

2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit/pembiayaan BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 60,38%. Kredit/pembiayaan di wilayah ini tumbuh 10,68% (yoy), sedikit meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 10,31% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing tumbuh 8,94% (yoy) dan 14,13% (yoy). Besarnya penyaluran kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, penyaluran kredit/pembiayaan kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan porsi 18,50%. Kredit/pembiayaan di

wilayah ini tumbuh 12,87% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 3,87% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh 20,95% (yoy).

Dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Kalimantan tumbuh tertinggi sebesar 46,58% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 30,41% (yoy) namun dengan porsi yang relatif kecil hanya sebesar 2,81% dari total penyaluran kredit/pembiayaan BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh provinsi Kalimantan Tengah dengan nominal kenaikan Rp847 miliar (yoy) atau tumbuh 98,86% (yoy).

Tabel 15 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)

	Kredit (RP M)			qtq	yoy		Porsi
	Mar'22	Des'22	Mar'23		Mar'22	Mar'23	
Jawa	80.728	86.858	89.350	2,33%	2,87%	10,31%	60,38%
Sumatera	24.253	26.440	27.374	3,22%	3,53%	3,87%	18,50%
Kalimantan	2.835	3.749	4.156	17,02%	10,85%	30,41%	2,81%
Bali - Nusra	14.729	15.277	15.510	1,82%	1,53%	4,75%	10,48%
Sulampua	10.920	11.419	11.580	1,09%	1,41%	3,71%	7,83%
Total	133.465	143.743	147.970	2,67%	2,94%	8,25%	100%

Sumber: SPI dan SPS Maret 2023

4 Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

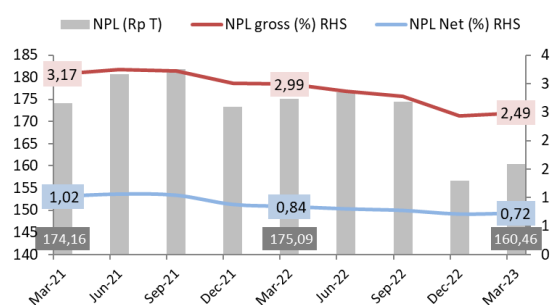
4 Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Sementara itu, risiko pasar sedikit meningkat namun masih terjaga seiring upaya bank menyeimbangkan portfolio SSB (*bonds' portfolio rebalancing*) yang dimiliki. Ke depan, kenaikan risiko perlu tetap diwaspadai seiring dengan kebijakan suku bunga ketat negara maju yang diperkirakan masih akan berlangsung serta guncangan sektor keuangan di AS dan Eropa.

1. Risiko Kredit

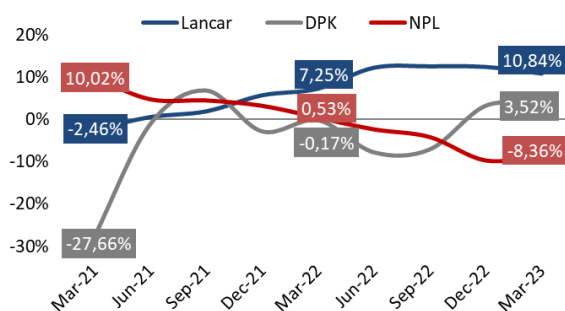
Pada Maret 2023, risiko kredit membaik tecermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,49%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,99% seiring dengan turunnya nominal NPL. Selain itu, rasio NPL *net* juga tercatat menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,84% menjadi 0,72% utamanya karena penurunan nominal NPL yang besar meskipun CKPN NPL menurun.

Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



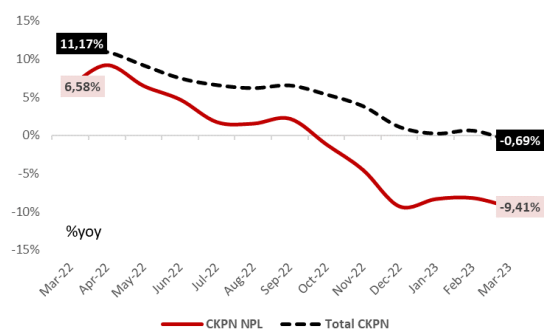
Sumber: SPI Maret 2023

Grafik 26 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit (yoy)



Sumber: SPI Maret 2023

Grafik 27 Pertumbuhan CKPN (yoy)



Sumber: LBUT

Secara total CKPN turun -0,69% (yoy), dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 11,17% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh turunnya CKPN NPL sebesar -9,41% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,58% (yoy). Meskipun CKPN menurun, namun *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar meningkat menjadi sebesar 16,85% (tahun sebelumnya 11,72%). *Coverage* CKPN terhadap kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) juga masih memadai sebesar 30,12% meskipun sedikit menurun dari tahun lalu (31,39%). Selain itu, *coverage* CKPN terhadap NPL juga meningkat menjadi sebesar 221,06% dari tahun lalu 203,98% sejalan dengan turunnya nominal NPL. Hal ini mengindikasikan antisipasi bank terhadap risiko kredit masih memadai. Perbankan senantiasa didorong untuk terus

meningkatkan *coverage* CKPN terhadap kredit yang direstrukturisasi khususnya jika terdapat tanda pemburukan pada debitur, serta sebagai langkah antisipatif berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi per 31 Maret 2023. Stimulus tersebut diperpanjang kembali menjadi s.d. 31 Maret 2024 khususnya untuk kredit UMKM, kredit sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Npmpr 34/KDK.03/2022.

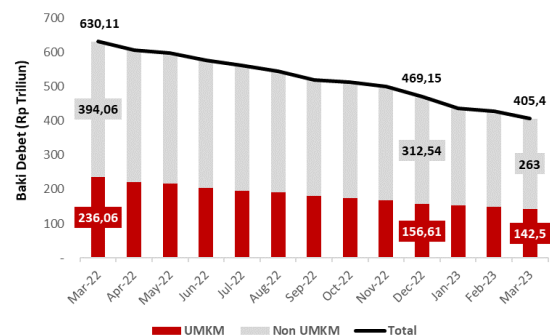
Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun lebih dalam sebesar -23,39% (yoy) dibandingkan posisi Maret 2022 yang turun -15,16% (yoy) sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi. Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar sebesar Rp457,04 triliun atau 64,32% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -30,25% (yoy) lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang turun -21,47% (yoy). Kredit restrukturisasi selain Lancar juga turun -6,88% (yoy) dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 5,16% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 7,09% dari 11,17% pada Maret 2022.

Lebih lanjut, kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 berada dalam tren penurunan.

Pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp405,42 triliun, atau berkontraksi -35,66% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp630,11 triliun. Jumlah debitur kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 juga menunjukkan tren penurunan menjadi 1,84 juta debitur dari tahun lalu sebanyak 3,51 juta debitur. Penurunan kredit restrukturisasi tersebut menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat.

Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan seiring masih tingginya ketidakpastian global seperti potensi resesi, perlambatan ekonomi, dan masih relatif tingginya inflasi yang berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik. Selain itu, tetap perlu diwaspadai rasio *Loan at Risk* sebesar 13,94%, meskipun sudah menurun dari tahun sebelumnya (18,79%).

Grafik 28 Tren Kredit Restrukturisasi terkait COVID-19



Sumber: SLIK OJK

Tabel 16 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Mar'22	Des'22	Mar'23	Porsi	qtq		yoy	
					Des'22	Mar'23	Mar'22	Mar'23
1. Lancar	5.417	6.023	6.004	93,15%	3,23%	-0,31%	7,25%	10,84%
- Non Restru	4.762	5.521	5.547	86,06%	4,64%	0,47%	12,94%	16,50%
- Restru	655	501	457	7,09%	-10,11%	-8,84%	-21,47%	-30,25%
2. DPK	271	244	281	4,36%	-8,28%	14,99%	-0,17%	3,52%
3. Kurang Lancar	20	19	19	0,29%	-9,13%	0,65%	-18,04%	-5,27%
4. Diragukan	28	25	31	0,48%	-18,85%	20,47%	16,81%	10,72%
5. Macet	127	112	111	1,72%	-8,24%	-1,29%	1,06%	-12,98%
Nominal NPL	175	157	160		-10,25%	2,48%	0,53%	-8,36%
Rasio NPL Gross %	2,99%	2,44%	2,49%		-34	5	-18	-50
Rasio NPL Net %	0,84%	0,71%	0,72%		-6	1	-18	-12
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	927	746	738		-9,52%	-1,03%	-16,23%	-20,36%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit	15,80%	11,61%	11,45%		-152	-16	-432	-435
<i>Loan at Risk (LaR)</i>	1.102	902	898		-9,64%	-0,42%	-13,95%	-18,45%
Rasio Loan at Risk (LaR)	18,79%	14,05%	13,94%		-187	-11	-450	-485
Total Kredit	5.863	6.424	6.445		2,37%	0,34%	6,67%	9,93%

Sumber: SPI Maret 2023

Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit pada semua jenis penggunaan kredit. Rasio NPL Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing turun menjadi 3,37%; 1,89%; dan 1,64% dari 4,02%; 2,59%; dan 1,69% pada tahun sebelumnya. Secara umum, penurunan rasio NPL KMK, KI, dan KK didorong oleh semua kelompok bank.

Berdasarkan kelompok bank, penurunan rasio NPL KMK utamanya didorong oleh KCBLN dari tahun sebelumnya sebesar 2,62% menjadi 1,39%. Sejalan dengan hal tersebut, penurunan rasio NPL KI dan KK juga utamanya didorong oleh KCBLN dengan rasio NPL masing-masing yang membaik dari 2,97% dan 2,31% pada tahun lalu menjadi 1,53% dan 2,05%.

Di sisi lain, rasio NPL KMK pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Namun demikian, pada periode laporan rasio NPL KMK, KI, dan KK BPD tercatat membaik, masing-masing menjadi 6,47%; 2,37%; dan 1,02% dari 7,82%; 3,33%; dan 1,09% pada tahun sebelumnya. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,28%, membaik dari tahun sebelumnya sebesar 2,63%.

Tabel 17 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Mar'21	Mar'22	Mar'23	yoy	
				Mar'22	Mar'23
KMK	2.472	2.661	2.915	7,65%	9,54%
KI	1.474	1.556	1.733	5,56%	11,41%
KK	1.551	1.646	1.797	6,13%	9,18%
Total Kredit	5.496	5.863	6.445	6,68%	9,93%

Sumber: SPI Maret 2023

Tabel 18 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Mar'21	Mar'22	Mar'23	yoy	
				Mar'22	Mar'23
NPL KMK	4,09	4,02	3,37	-7	-65
NPL KI	3,01	2,59	1,89	-42	-70
NPL KK	1,85	1,69	1,64	-16	-5
Total NPL	3,17	2,99	2,49	-18	-50

Tabel 19 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.307.047	44,85	3,64	826.371	28,36	1,94	780.773	26,79	1,55	2,60
Bank Swasta	1.365.352	48,95	3,03	798.648	28,63	1,82	625.180	22,41	2,13	2,48
BPD	112.577	19,76	6,47	76.677	13,46	2,37	380.478	66,78	1,02	2,28
KCBLN	129.908	75,37	1,39	31.785	18,44	1,53	10.663	6,19	2,05	1,46
TOTAL	2.914.884	45,22	3,37	1.733.481	26,89	1,89	1.797.093	27,88	1,64	2,49

Sumber: SPI Maret 2023

1.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan rasio NPL terbesar terdapat pada sektor pertambangan yang juga diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (PMM); *real estate*; industri pengolahan; perantara keuangan; serta transportasi.

Rasio NPL sektor pertambangan turun signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,25% menjadi 2,31% sejalan dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,55 triliun (yoy) disertai naiknya pertumbuhan kredit sektor pertambangan yang tumbuh 43,41% (yoy). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL pada subsektor pertambangan batubara, penggalan gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara. Hal ini sejalan dengan realisasi produksi batubara dalam negeri sebesar 144,30 juta ton pada 24 Maret 2023 atau mencapai 20,76% dari target produksi batubara tahun ini yang mencapai

695 juta ton (Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Dari hasil produksi tersebut tercatat penjualan batubara sudah mencapai 34,82 juta ton (13,98 juta ton untuk domestik dan 20,84 juta ton untuk ekspor). Di samping itu, sektor pertambangan juga turut menopang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Maret 2023 yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi selama empat tahun terakhir yaitu hingga 43,7% (yoy). Penerimaan tertinggi berasal dari sektor nonmigas dari Rp15,1 triliun pada Maret 2022 menjadi Rp44,3 triliun atau tumbuh 193,37% (yoy) seiring perkembangan harga batubara yang masih bergerak dalam tren kenaikan. Untuk ke depannya, HBA diprediksi akan tetap tinggi meskipun saat ini mulai melandai. Perkiraan tetap tingginya HBA antara lain karena potensi naiknya permintaan komoditas tersebut utamanya dari India, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa serta kembali naiknya harga gas. Pasalnya, batubara merupakan sumber energi alternatif pembangkit listrik Eropa dan

India di tengah terbatasnya pasokan minyak dan gas akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Krisis listrik yang menimpa India akibat gelombang hawa panas menyebabkan pemerintah India meningkatkan jumlah impor batubara karena ketatnya suplai domestik. Selain itu, permintaan batubara Tiongkok sebagai konsumen terbesar batubara dunia juga diperkirakan akan meningkat seiring cuaca yang lebih dingin dan potensi pelanggaran kontrol Covid-19 secara bertahap.

Rasio NPL sektor PMM tercatat membaik dari 6,42% menjadi 4,71% sejalan dengan nominal NPL yang menurun sebesar Rp2,06 triliun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh kinerja subsektor penyediaan akomodasi seiring dengan pelanggaran kebijakan mobilitas masyarakat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Kebijakan ini diambil karena penanganan pandemi terus membaik di sepanjang tahun 2022. Kebijakan tersebut juga dinilai akan mendorong ketahanan (resiliensi) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihadapkan dengan ancaman krisis global serta pemulihan sektor ekonomi terutama pariwisata karena aktivitas masyarakat akan kembali normal. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terindikasi semakin menguat pascapandemi meski belum mencapai level prapandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan I-2023 secara kumulatif mencapai 2,5 juta kunjungan atau naik 508,87% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah mengerahkan

beragam dukungan untuk mendorong akselerasi pemulihan industri pariwisata nasional melalui instrumen APBN, antara lain: pengembangan desa wisata; bantuan atau insentif ke pelaku usaha pariwisata; sertifikasi tempat-tempat wisata sesuai standar *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE), dan penyediaan fasilitas vaksinasi Covid-19 di lokasi wisata.

Rasio NPL sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan tercatat membaik dari 2,86% menjadi 1,85% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,88 triliun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama dengan penurunan rasio NPL dari tahun lalu sebesar 2,69% menjadi 1,51%.

Rasio NPL sektor industri pengolahan tercatat membaik dari 4,87% menjadi 3,99% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp6,02 triliun. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor industri furnitur dan industri pengolahan lainnya serta industri pakaian jadi. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, NPL subsektor industri furnitur dan industri pengolahan lainnya membaik dari 11,33% menjadi 2,69%. Selain itu, rasio NPL subsektor industri pakaian jadi juga membaik dari 11,56% menjadi 9,99% meskipun masih tergolong tinggi (>5%).

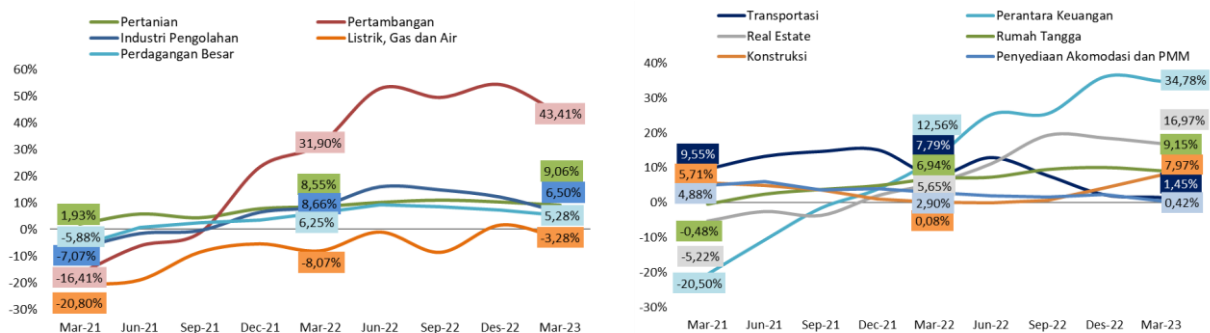
Rasio NPL sektor perantara keuangan tercatat membaik dari 1,46% menjadi 0,59% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,56 triliun (yoy) disertai naiknya pertumbuhan kredit sektor perantara keuangan yang tumbuh 34,78% (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya

didorong oleh subsektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun.

Rasio NPL sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi juga tercatat membaik dari 2,00% menjadi 1,29% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp2,04 triliun. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor angkutan air untuk

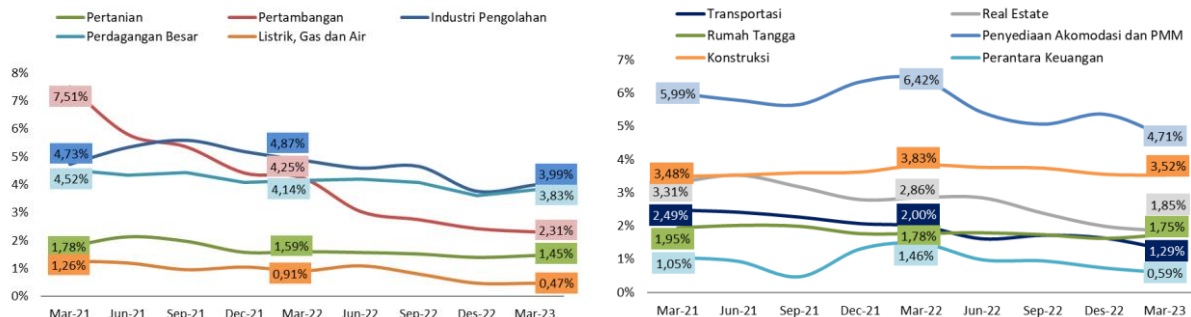
penyeberangan domestik. Kenaikan jumlah penumpang domestik selama triwulan I-2023 yang mencapai 14,2 juta orang atau tumbuh sebesar 32,69% (yoy) ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong membaiknya rasio NPL sektor transportasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 29 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



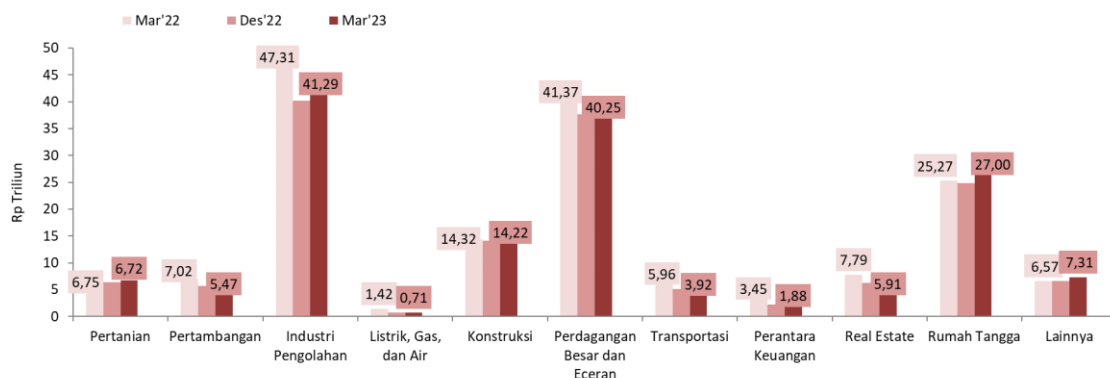
Sumber: SPI Maret 2023, diolah

Grafik 30 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2023, diolah

Grafik 31 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2023

1.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi proyek, perbaikan risiko kredit terjadi pada hampir seluruh wilayah kecuali Papua dan Maluku. Perbaikan sejalan dengan momentum pemulihan ekonomi domestik yang masih terus berlanjut dan menunjukkan penguatan sehingga mendorong kenaikan mobilitas masyarakat, pemulihan kinerja, aktivitas sektor usaha, dan meningkatkan permintaan kredit.

Rasio NPL pada wilayah Jawa tercatat membaik dari 2,99% menjadi 2,56%. Penurunan nominal NPL terbesar utamanya pada Provinsi DKI Jakarta (porsi kredit 45,03% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa) dengan perbaikan rasio dari 1,97% menjadi 1,40% dengan penurunan nominal NPL Rp7,03 triliun. Selama ini provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki porsi kredit tertinggi di Pulau Jawa dengan jumlah penyaluran kredit sebesar Rp1.968,91 triliun pada Maret 2023. Penurunan nominal NPL Provinsi DKI Jakarta utamanya didorong oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (PMM) sebesar Rp1,89 triliun atau secara rasio membaik dari 8,87% menjadi 2,63% seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata, penyelenggaraan *event* musik dan olahraga, serta gelaran *Meeting Incentive Conference Exhibition* (MICE) berskala nasional dan internasional.

Selanjutnya, wilayah Sumatera juga mencatatkan perbaikan rasio NPL dari 3,06% menjadi 2,51%. Penurunan nominal NPL terbesar utamanya didorong oleh provinsi Bengkulu (meskipun hanya memiliki porsi kredit 3,41% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera). Secara umum

perbaikan rasio NPL pada provinsi tersebut ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran dari 19,76% (Maret 2022) menjadi 3,53% (Maret 2023) dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp983,7 miliar. Perbaikan rasio NPL sektor perdagangan besar dan eceran tersebut sejalan dengan kinerja ekspor Bengkulu pada bulan Maret 2023 yang mencapai USD25,26 juta atau tumbuh 15,19% (mtm) dibandingkan Februari 2023 dan tumbuh 3,74% (yoy) dibandingkan Maret 2022. Jika dilihat menurut komoditas, ekspor provinsi Bengkulu pada Maret 2023 didominasi oleh batubara (porsi: 91,61%) dan karet (porsi: 3,72%).

Selain itu, rasio NPL di wilayah Kalimantan juga menunjukkan perbaikan dari 2,56% menjadi 1,59%. Penurunan nominal NPL di wilayah Kalimantan utamanya didorong oleh Provinsi Kalimantan Timur (porsi kredit 21,10% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan) sebesar Rp2,37 triliun atau secara rasio turun dari 6,36% menjadi 2,29%. Dalam hal ini, penurunan nominal NPL di provinsi tersebut sebagian besar didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan pertambangan. Rasio NPL sektor industri pengolahan membaik dari 9,62% menjadi 0,15%. Rasio NPL sektor perdagangan besar membaik dari 6,36% menjadi 2,29%. Rasio sektor pertambangan membaik dari 1,86% menjadi 0,52%. Secara umum, perbaikan risiko kredit di perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan akan terus berlanjut, salah satunya didorong oleh implikasi atas pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga ditengarai akan mendorong percepatan pembangunan

proyek strategis dan infrastruktur prioritas lainnya yang secara langsung akan berdampak positif terhadap kinerja sektor konstruksi dan meningkatkan *appetite* investor.

Perbaikan rasio NPL juga terlihat pada wilayah Sulawesi dari 3,48% menjadi 2,88%. Penurunan nominal NPL terbesar utamanya ditopang oleh provinsi Sulawesi Selatan (porsi kredit: 44,47% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi) sebesar Rp2,93 triliun. Dalam hal ini, penurunan NPL di provinsi tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, perantara keuangan, dan PMM. Secara umum perbaikan rasio NPL pada provinsi tersebut seiring dengan perekonomian Sulawesi Selatan yang terus tumbuh positif menuju target Pemerintah. Hal ini salah satunya tecermin dari pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan pada triwulan I-2023 yang tumbuh 5,29% (yoy) melampaui pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,03% (yoy).

Pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) juga terjadi perbaikan rasio NPL dari 2,84% menjadi 2,72%. Penurunan nominal NPL terbesar utamanya didorong oleh provinsi Bali (porsi kredit: 47,97% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Bali Nusra) sebesar Rp279,81 miliar. Penurunan nominal NPL Bali dan Nusra utamanya dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan. Rasio NPL sektor industri pengolahan turun dari 6,38% menjadi 1,80%. Hal ini juga sejalan dengan pemulihan sektor pariwisata Bali yang turut mendorong kegiatan usaha. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 370.832

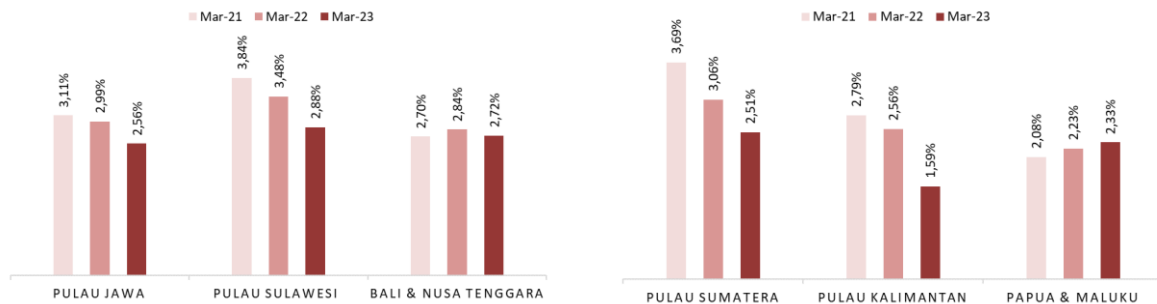
kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada Maret 2023, tumbuh 14,59% (mtm) dari periode Februari 2023 sebanyak 323.623 kunjungan.

Di sisi lain, pada wilayah Papua dan Maluku terjadi kenaikan rasio NPL dari 2,23% menjadi 2,33%. Peningkatan nominal NPL terbesar utamanya didorong oleh provinsi Papua (porsi kredit: 37,91% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Papua dan Maluku) sebesar Rp102,99 miliar. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya nominal NPL pada sektor transportasi; perdagangan besar; pertanian; perikanan; dan rumah tangga (pemilikan peralatan rumah tangga lainnya termasuk pinjaman multiguna). Dari kelima sektor tersebut hanya sektor perikanan dan transportasi yang mengalami pemburukan rasio NPL di level cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 11,43% dan 5,07% dari tahun sebelumnya sebesar 2,56% dan 1,47%. Sementara itu, rasio NPL sektor perdagangan besar, pertanian, dan rumah tangga lainnya termasuk pinjaman multiguna masih relatif terjaga. Rasio NPL sektor perdagangan besar naik dari 4,45% menjadi 4,94%. Rasio sektor pertanian naik dari 0,74% menjadi 0,86%. Khusus sektor rumah tangga meskipun secara nominal NPL meningkat sebesar Rp8,65 miliar namun demikian rasio kredit bermasalahnya justru membaik dari 1,41% menjadi 1,30%. Adapun kenaikan nominal NPL sektor rumah tangga didorong oleh subsektor kepemilikan rumah tangga lainnya termasuk pinjaman multiguna.

Tabel 20 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Perantara Keuangan	Total
Jawa	1,58%	1,75%	4,63%	0,42%	2,86%	3,74%	1,18%	1,85%	0,58%	2,56%
Sumatera	1,24%	9,20%	1,64%	0,09%	5,33%	4,86%	1,97%	1,65%	2,76%	2,51%
Kalimantan	0,81%	0,70%	0,59%	3,08%	6,24%	3,34%	0,88%	1,51%	2,17%	1,59%
Sulawesi	5,07%	1,51%	6,64%	0,08%	6,42%	4,00%	3,52%	1,76%	1,40%	2,88%
Bali & Nusa Tenggara	1,80%	0,29%	1,83%	0,34%	11,65%	2,94%	2,06%	1,36%	1,10%	2,72%
Papua & Maluku	0,73%	0,06%	0,60%	1,09%	14,61%	3,43%	4,38%	1,30%	0,43%	2,33%
Total	1,45%	2,31%	3,99%	0,47%	3,52%	3,83%	1,29%	1,75%	0,59%	2,49%

Sumber: LBUT, diolah

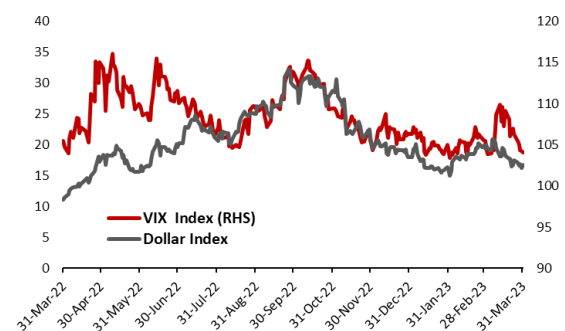
Grafik 32 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)

Sumber: LBUT, diolah

2. Risiko Pasar

Tekanan di pasar keuangan global mulai mereda pada akhir triwulan I-2023 meski masih diliputi ketidakpastian global. Hal tersebut didorong oleh pemulihan kondisi ekonomi beberapa negara termasuk Indonesia yang tumbuh cukup baik serta *reopening* ekonomi Tiongkok yang dipercaya dapat menahan perlambatan ekonomi global lebih lanjut. Meski demikian, faktor ketidakpastian global masih tetap perlu diwaspadai seiring dengan tekanan geopolitik khususnya antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, inflasi yang masih cukup tinggi meskipun mulai melandai, serta guncangan di sektor keuangan utamanya di AS dan Eropa. Pengetatan kebijakan moneter dengan kenaikan suku bunga acuan global masih dilakukan di negara maju khususnya

AS, UK, dan Eropa seiring dengan inflasi yang relatif masih tinggi meski mulai melandai. Hal tersebut berpotensi meningkatkan *capital outflow* dari negara *emerging* ke negara maju, khususnya ke pasar keuangan AS (*dollar USD* sebagai *safe-haven asset*) yang kemudian dapat berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD.

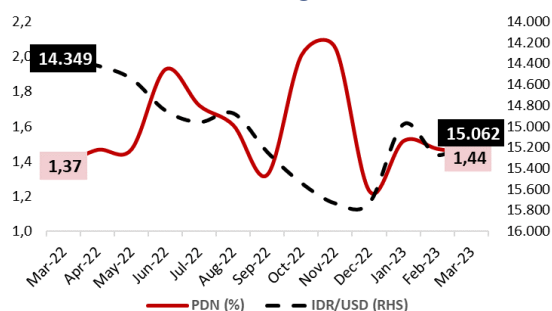
Grafik 33 Dolar Index dan VIX Index

Sumber: Reuters

2.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir Maret 2023, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp15.062/USD, melemah 4,97% dari posisi akhir Maret 2022 sebesar Rp14.349/USD. Meski demikian, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada Maret 2023 masih terjaga rendah dan stabil sebesar 1,44% dan berada pada posisi *long* (kewajiban valas yang dimiliki bank lebih rendah dibandingkan aset valasnya). Hal tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (50 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 34 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar

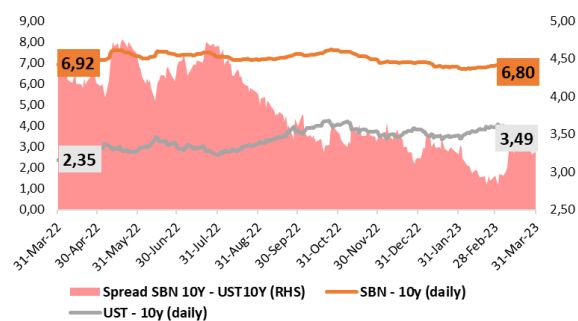


Sumber: Bank Indonesia

2.2 Risiko Suku Bunga

Sebagai pengaruh dari sentimen negatif kebijakan moneter The Fed yang *hawkish* melalui penjualan aset dan kenaikan FFR AS, *yield Treasury* AS (UST) juga menunjukkan peningkatan hingga Maret 2023. Kenaikan tersebut berdampak pada menyempitnya *spread yield* UST dengan *yield* SBN yang dapat memengaruhi terbatasnya aliran arus modal asing masuk ke domestik.

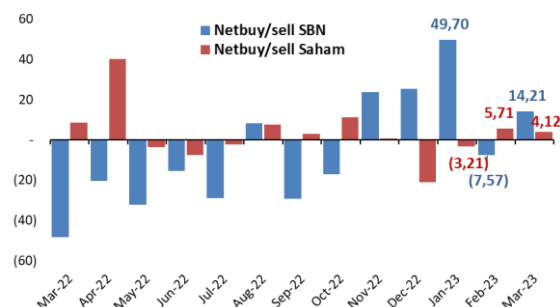
Grafik 35 Spread Yield UST dan SBN



Sumber: PHEI dan Reuters

Indikasi tersebut ditunjukkan oleh transaksi investor non residen di pasar SBN yang mencatatkan *capital outflow* selama setahun terakhir atau *net sell* sebesar Rp29,75 triliun. Meskipun demikian, pelemahan lebih dalam tertahan oleh masuknya modal asing di pasar saham yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp35,14 triliun.

Grafik 36 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



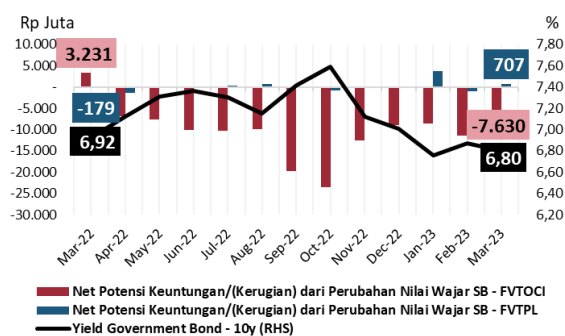
Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang dilihat dari nilai wajar berdasarkan *market-to-market* mulai membaik. Hal tersebut terlihat dari nilai wajar portofolio *trading book* yang meningkat seiring dengan *yield* SBN yang lebih rendah dari tahun lalu. Pada Maret 2023, *yield* SBN turun menjadi 6,80% dibandingkan dengan posisi tahun lalu (Maret 2022) sebesar 6,92%, sehingga nilai wajar surat berharga kategori *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL) yang dimiliki oleh bank meningkat. Selain itu, pada

portofolio obligasi kategori *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVTOCI), kerugian nilai wajar menunjukkan penurunan seiring dengan penurunan *yield*.

Dalam hal ini, perbankan memitigasi potensi kerugian tersebut dengan (1) menyesuaikan portofolio surat berharga dengan mengurangi porsi/nominal kepemilikan kategori FVTPL ke kategori *Amortized Cost* (AC), dan/atau (2) mengalihkan kepemilikan surat berharga ke tenor jangka pendek yang memiliki risiko suku bunga relatif lebih rendah dibandingkan tenor jangka panjang.

Grafik 37 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan



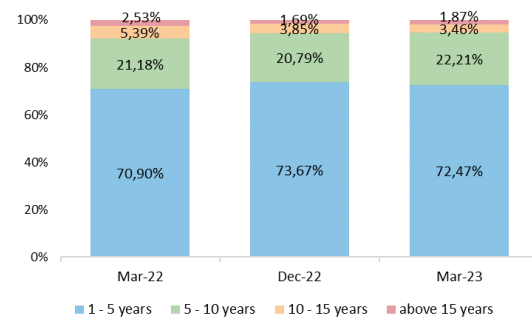
Sumber: Reuters dan LBU

Tabel 21 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)		Porsi SSB (%)	
	Mar-22	Mar-23	Mar-22	Mar-23
FVTOCI	910,64	911,11	49,36%	47,36%
FVTPL	134,95	132,04	7,32%	6,86%
AC	799,13	880,65	43,32%	45,78%
Total Industri	1.844,71	1.923,81	100%	100%

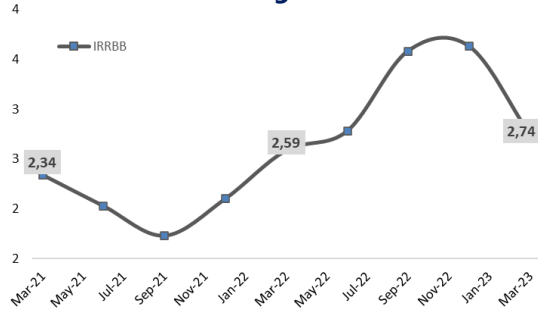
Sumber: LBU/LBUT

Grafik 38 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor



Sumber: LBU/LBUT

Di sisi lain, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tecermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 2,74%, meski meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,59%. Peningkatan IRRBB didorong oleh meningkatnya kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang tumbuh 43,08% (yoy) utamanya dalam bentuk kenaikan pinjaman yang diterima dan simpanan berjangka. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang juga meningkat dengan pertumbuhan 34,93% (yoy) yang utamanya didorong oleh kenaikan kredit. Sementara itu, aset jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perbankan turun sebesar -5,25% (yoy), jauh menurun dari tahun lalu yang tumbuh 20,54% (yoy).

Grafik 39 Perkembangan Parameter IRRBB

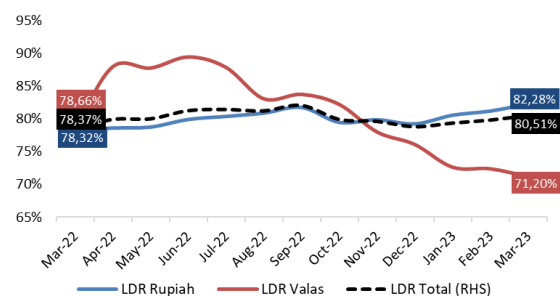
Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

3. Risiko Likuiditas

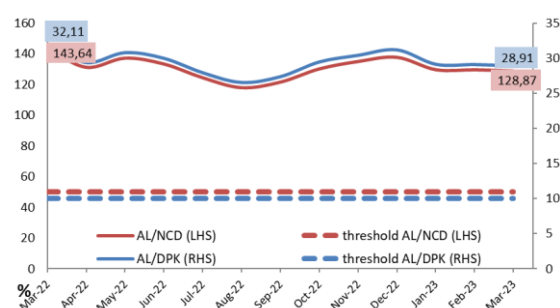
Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai di tengah naiknya pertumbuhan kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio LCR di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masih berada di atas *threshold* (100%). Meski demikian, perlu diperhatikan adanya kenaikan pada volume transaksi PUAB yang juga diiringi dengan kenaikan suku bunga yang dapat mengindikasikan adanya kebutuhan dana jangka pendek oleh Bank.

Pada Maret 2023, LDR perbankan tercatat sebesar 80,51%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 78,37%. Peningkatan LDR didorong oleh naiknya LDR rupiah menjadi 82,28% dari tahun sebelumnya sebesar 78,32%. Selain itu, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing masih terjaga sebesar 128,87% dan 28,91%, jauh berada di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), meskipun menurun dari tahun

sebelumnya masing-masing sebesar 143,64% dan 32,11%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh terkontraksinya alat likuid seiring meningkatnya penyaluran kredit serta naiknya kebutuhan penempatan dana di Bank Indonesia dalam pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap sejak Maret 2022. Per 1 September 2022, pemenuhan GWM Rupiah naik menjadi 9% dari 7,5% pada Juli 2022 (untuk BUK), dan menjadi 7,5% dari 6,0% (untuk BUS dan UUS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Grafik 40 LDR berdasarkan Valuta

Sumber: LBUT

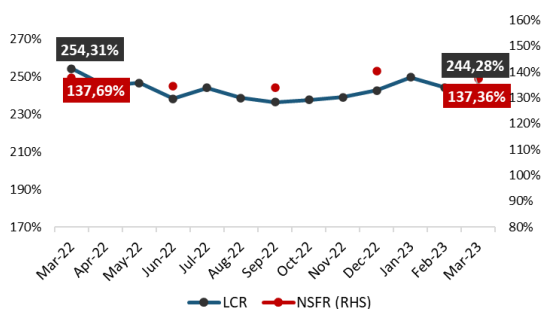
Grafik 41 AL/NCD dan AL/DPK

Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin

dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 244,28% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 254,31%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh lebih tinggi sebesar 10,41% (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan *High Quality Liquid Asset* (HQLA) sebesar 6,05% (yoy). Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 137,36%, relatif stabil dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 137,69%. Pada Maret 2023, tidak terdapat bank yang memiliki rasio LCR maupun NSFR di bawah *threshold* 100%.

Grafik 42 Perkembangan LCR dan NSFR



Sumber: APOLO

Tabel 22 Perkembangan LCR Perbankan

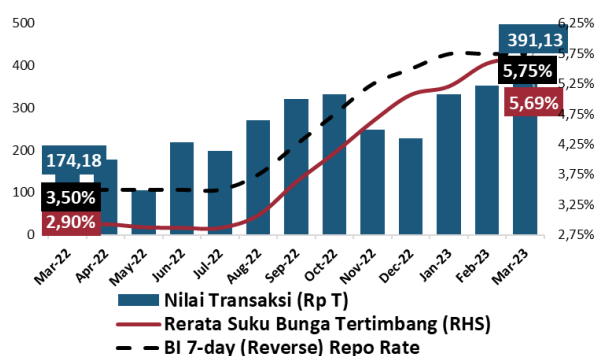
Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Mar-22	Dec-22	Mar-23
KBMI 2	404	412	436
KBMI 3	666	669	709
KBMI 4	1.441	1.592	1.516
Bank Asing	122	116	130
TOTAL HQLA	2.632	2.789	2.791

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Mar-22	Dec-22	Mar-23
KBMI 2	133	152	141
KBMI 3	290	297	292
KBMI 4	563	657	660
Bank Asing	49	44	50
TOTAL NCO	1.035	1.150	1.143

Kelompok	LCR (%)		
	Mar-22	Dec-22	Mar-23
KBMI 2	303,16	270,41	310,22
KBMI 3	229,28	225,13	243,32
KBMI 4	256,01	242,46	229,61
Bank Asing	250,25	265,85	258,17
LCR Industri	254,31	242,58	244,28

Sumber: OJK

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, dengan volume yang meningkat diiringi suku bunga rata-rata tertimbang yang juga meningkat. Peningkatan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan keputusan BI meningkatkan suku bunga acuan BI *7-Days Repo Rate* (BI7DRR) setahun terakhir hingga Maret 2023 telah naik sebesar 125 bps menjadi 5,75%. Selain itu, meningkatnya volume transaksi PUAB juga antara lain dapat dipengaruhi oleh naiknya pemenuhan kewajiban GWM BI.

Grafik 43 Perkembangan Suku Bunga PUAB

Sumber: LBUT Harian

4. Risiko Hukum

4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan I-2023, terdapat dua kantor Bank dengan empat Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan berjalan maupun pada periode sebelumnya, sebanyak tiga kantor Bank dengan tiga PKP sedang dalam proses, dan sebanyak empat kantor dengan tujuh PKP telah selesai diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada satuan kerja terkait penyidikan OJK.

Tabel 23 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2023					
	Bank Umum		BPR		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1. PKP yang diterima	1	1	1	3	2	4
2. PKP dalam proses *)	3	3	-	-	3	3
3. PKP yang dikembalikan *)	-	-	-	-	-	-
4. PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	1	1	3	6	4	7

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya

Sumber: OJK

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan Bank, telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) terhadap 6 kantor bank.

4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama triwulan I-2023, dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan pemberian

keterangan Ahli dan keterangan Saksi Pelapor sebanyak 10 kali. Pemberian keterangan Ahli merupakan pemenuhan atas lima permintaan dari Polri dan tiga permintaan dari Kejaksaan RI. Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas dua permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan

Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

Tabel 24 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	5	0	5
2	Kejaksaan RI	3	2	5
3	Penyidik OJK	0	0	0
Total		8	2	10

Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan tiga surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) serta tiga pengaturan terkait perbankan syariah. OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan I-2023, OJK menerbitkan tiga surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP), yaitu:

1. Surat KEPP Nomor 3/D.03/2023 perihal Penerapan Pelaporan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi BUK KBMI 1 Non Bank Asing.

Latar Belakang:

Dalam rangka mendukung penguatan likuiditas pada Bank Umum Konvensional (BUK) dan menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan BUK pada tanggal 24 Januari 2023, diperlukan pelaporan secara berkala oleh seluruh BUK atas rasio likuiditas yang dapat diperbandingkan dan mengacu pada standar internasional, yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Pokok Ketentuan:

- a) BUK dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI1) non bank asing agar melakukan pemantauan, pemenuhan rasio minimal, dan penyampaian laporan terkait rasio likuiditas yaitu Laporan LCR dan NSFR, pertama kali dilakukan untuk posisi data bulan

Maret 2023, masing-masing secara bulanan dan triwulanan

- b) Laporan disampaikan melalui sistem pelaporan OJK (APOLO).
- c) Pelaporan LCR NSFR bagi BUK KBMI1 non bank asing ini merupakan tahap awal sehingga belum terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam POJK LCR dan POJK NSFR.
- d) Bagi BUK KBMI1 non bank asing yang ke depannya berubah status menjadi BUK KBMI2, KBMI3, KBMI4, atau bank asing maka kewajiban penyampaian laporan akan berlaku sesuai POJK LCR, POJK NSFR, dan ketentuan APOLO BUK, termasuk pengenaan sanksi apabila terjadi keterlambatan dan/atau kesalahan pelaporan.

2. Surat KEPP Nomor 4/D.03/2023 perihal Penyesuaian dan Penegasan SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (surat ini ditujukan kepada seluruh Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan/LPIP) yaitu PT Pefindo Biro Kredit, PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan, PT Kredit Biro Indonesia Jaya).

Latar Belakang:

SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (SEOJK LPIP) telah ditetapkan

pada tanggal 22 Desember 2022 serta hasil dan tindak lanjut audiensi dengan LPIP yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023, sehingga diperlukan penyesuaian dan penegasan terhadap beberapa poin dalam SEOJK LPIP.

Pokok Ketentuan:

- a) Pembatasan data informasi debitur yang sebelumnya diatur dalam SEOJK LPIP untuk akses kredit/pembiayaan debitur UMKM (seluruhnya) dan kredit/pembiayaan selain debitur UMKM sampai dengan Rp5 Miliar menjadi kredit/pembiayaan debitur UMKM (seluruhnya) dan kredit/pembiayaan selain debitur UMKM sampai dengan Rp10 Miliar.
 - b) Biaya perolehan data dikenakan sesuai SEOJK LPIP sejak November 2022.
 - c) LPIP harus menatausahakan bukti persetujuan pemanfaatan data (*consent data*) dari pemilik akhir.
 - d) LPIP hanya menatausahakan *underlying document* permintaan informasi debitur dari anggota LPIP yang bukan merupakan pelapor SLIK, sedangkan untuk anggota LPIP yang merupakan pelapor SLIK maka dokumen ditatausahakan pelapor dimaksud disertai kode referensi.
 - e) LPIP diharapkan menambah perolehan data dari selain data SLIK agar semakin memperkaya cakupan data sehingga lebih luas dari data yang dimiliki pelapor SLIK untuk menghasilkan informasi perkreditan yang lebih berkualitas.
3. Surat KEPP Nomor 5/D.03/2023 perihal Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada Term Deposit Operasi Pasar Terbuka

Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia (TD OPT Valas BI).

Latar Belakang:

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor telah diterbitkan sehingga diperlukan penegasan terkait pencatatan akuntansi dari Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada *Term Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia*.

Pokok Ketentuan:

OJK mendukung penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/18/PBI/2022 yang memperkenalkan pemanfaatan instrumen *Term Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional dalam Valuta Asing di BI (TD OPT Valas BI)* sebagai alternatif penempatan dari dana Devisa Hasil Ekspor yang disimpan di Indonesia.

Pada saat eksportir/nasabah memilih penempatan di TD OPT Valas BI, bank melakukan *pass-on* dana eksportir ke Bank Indonesia. Bunga atau imbal hasil dari penempatan TD OPT Valas BI tersebut sepenuhnya diteruskan kepada nasabah. Atas instrumen tersebut, bank tidak dapat menghentikan penempatan ataupun menjadikannya sebagai agunan. Sebagai timbal baliknya, Bank akan memperoleh jasa pengelolaan rekening. Laporan keuangan bank disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan bank harus merepresentasikan substansi fenomena ekonomik untuk

merepresentasikan hak dan kewajiban tersebut secara tepat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, OJK memandang bahwa aktivitas penempatan TD OPT Valas BI ini dalam Laporan keuangan bank harus disajikan sebagai berikut:

- a. Dana eksportir yang ditempatkan di TD OPT Valas BI disajikan sebagai Liabilitas Lainnya dan di sisi aset penempatan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- b. Bank menyajikan *fee/imbal* hasil yang diterima dari Bank Indonesia sebagai pendapatan non bunga, sedangkan bunga/imbal hasil dari penempatan TD OPT Valas BI langsung di-*pass through* kepada nasabah eksportir.

Aset dan Liabilitas yang timbul dari penempatan TD OPT Valas BI secara umum (sepanjang tidak terdapat eksposur risiko) tidak berdampak pada perlakuan secara prudensial (i.e. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net-Stable Funding Ratio* (NSFR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)/*Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan Kualitas Aset).

Selain itu pada triwulan I-2023, OJK juga menerbitkan tiga pengaturan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) terkait perbankan syariah, yaitu:

1. SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2023 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Laporan Bulanan BPRS).
SEOJK Laporan Bulanan BPRS ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pedoman bagi BPRS untuk menyusun Laporan Bulanan BPRS yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. SEOJK ini merupakan ketentuan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Laporan Bulanan BPRS 2019).
2. SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2023 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah (SEOJK Konversi BUK).
SEOJK Konversi BUK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, sebagai pedoman bagi BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha/konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). SEOJK ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.
3. SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2023 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (SEOJK Konversi BPR).
SEOJK Konversi BPR merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, sebagai pedoman

bagi BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha/konversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). SEOJK ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional (BUK)

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan I-2023, telah diselesaikan sebelas perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari tiga pembukaan kantor, tiga penutupan kantor, empat perubahan status, dan satu perubahan nama bank. Perizinan tersebut sebagian besar berupa perubahan peningkatan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi Kantor Cabang (KC) sebanyak empat perizinan. Adapun terdapat persetujuan permohonan perubahan nama bank atas PT Bank Fama International menjadi PT Super Bank Indonesia Tbk.

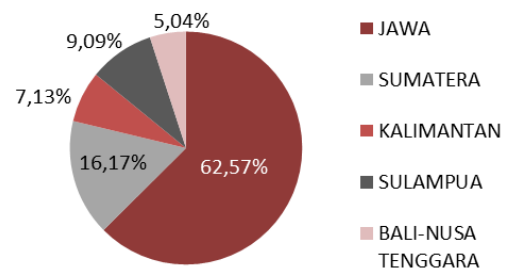
2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2023, terdapat 119.738 jaringan kantor BUK, terdiri dari 119.672

jaringan kantor di dalam negeri dan 66 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.772 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan sebanyak 2.626 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM).

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 74.876 jaringan kantor (62,57%), diikuti pulau Sumatera 19.351 (16,17%), Sulampua 10.884 (9,09%), Kalimantan 8.534 (7,13%), dan Bali-Nusa Tenggara 6.027 (5,04%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terdapat di semua wilayah dengan penurunan terbanyak di Jawa sejumlah 1.998 jaringan kantor.

Grafik 44 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

Tabel 25 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR		2022 TW IV	2023 TW I	Δ
1	Kantor Pusat Operasional	39	39	-
2	Kantor Pusat Non Operasional	55	55	-
3	Kantor Cabang Bank Asing	7	7	-
4	Unit Usaha Syariah	20	20	-
5	Kantor Wilayah	144	146	2
6	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.737	2.727	(10)
7	Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	17	-
8	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23	23	-
9	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	20.162	19.833	(329)
10	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11	Kantor Fungsional	1.129	1.101	(28)
12	Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk 11,12,13,14	12	12	-
13	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	5	-
14	Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM)	94.016	91.772	(2.244)
JARINGAN KANTOR UUS				
15	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	180	185	5
16	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	200	215	15
17	Kantor Kas	58	53	(5)
18	Kantor Fungsional	11	12	1
19	Payment Point	86	76	(10)
20	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	25	23	(2)
21	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	200	195	(5)
22	Layanan Syariah Bank Umum	3.231	3.215	(16)
TOTAL		122.364	119.738	(2.626)

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

2.2 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan I-2023, terdapat tiga jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi BPR, penggabungan (merger) dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan izin usaha PT Prima Master Bank menjadi Izin Usaha PT BPR Prima Master Bank.
2. Tiga persetujuan penggabungan BPR
 - a) PT BPR Rangkiang Nagari, PT BPR Cahaya Intan Mandiri, PT BPR LPN Padang Magek, PT BPR Luhan Nan

Tuo dan PT BPR LPN Pandai Sikek ke dalam PT BPR Gudam;

- b) PT BPR Artha Daya dan PT BPR Sejahtera Arthatama Mandiri ke dalam PT BPR Sejahtera Artha Sembada;

- c) PT BPR Porsea Jaya ke dalam PT BPR Bandar Jaya.

3. Persetujuan pencabutan izin usaha PT BPR Bagong Inti Marga.

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2023, terdapat 1.426 BPR dengan 8.241 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 6.031 di antaranya

merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Terdapat perbedaan data peningkatan jumlah BPR dengan data perizinan disebabkan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

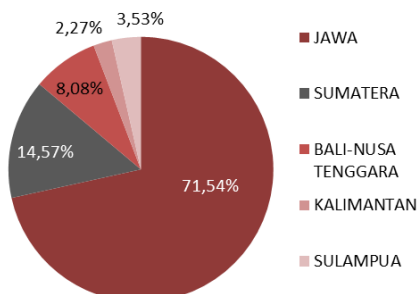
Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan payment point) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 71,54% (5.896 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 14,57% (1.201 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan jaringan kantor di hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan terbanyak di wilayah Jawa. Sementara itu, penurunan jaringan kantor hanya terdapat di wilayah Sumatera.

Tabel 26 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2022 TW IV	2023 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	1.441	1.426	(15)
- Kantor Cabang (KC)	1.892	1.907	15
- Kantor Kas (KK)	2.711	2.698	(13)
- ATM	288	354	66
- Payment Point	1.845	1.856	11
TOTAL	8.177	8.241	64

Sumber: OJK

Grafik 45 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



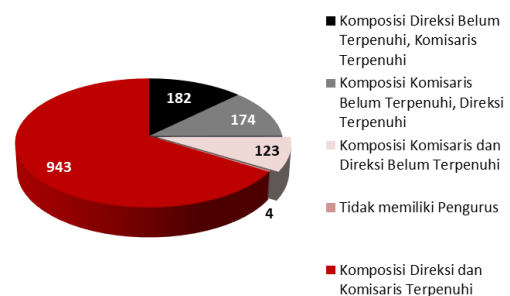
Sumber: OJK

2.2.3 Tata Kelola

Penerapan tata kelola BPR dan BPRS diatur dalam masing-masing POJK Nomor 4/POJK.03/2015 (BPR) dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 (BPRS) dan dibedakan sesuai besaran modal inti. Besaran modal inti BPR dan BPRS akan menentukan antara lain syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan jumlah DPS.

Pada triwulan I-2023, terdapat 943 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 123 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

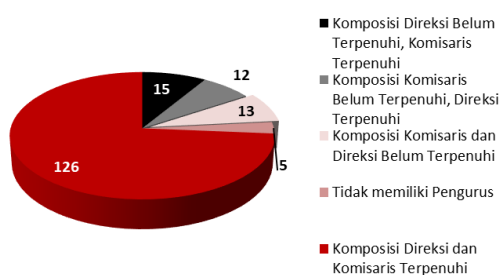
Grafik 46 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Untuk BPRS, pada triwulan I-2023, terdapat 126 BPRS yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 13 BPRS yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan.

Grafik 47 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

2.3 Perbankan Syariah

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan I-2023, telah diselesaikan lima permohonan perizinan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), terdiri dari tiga pemindahan alamat kantor UUS dan dua persetujuan prinsip pemisahan UUS (*spin off*). Adapun dua *spin off* UUS tersebut yaitu pada UUS BPD Daerah Istimewa Yogyakarta dan UUS Bank Sinarmas. Untuk pemindahan alamat, alasan

yang disampaikan oleh bank antara lain untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi.

Untuk perizinan BPRS, pada triwulan I-2023 terdapat tiga proses perizinan kelembagaan yang telah disetujui, yaitu:

1. Perubahan Kegiatan Usaha PT BPR Kroya Bangunartha menjadi PT BPRS Bangun Arta.
2. Perubahan Kegiatan Usaha PT BPR Guguk Mas Makmur menjadi PT BPRS Guguk Mas Makmur.
3. Penggabungan PT BPR Bandung Adiartha ke dalam PT BPRS Rahma Syariah.

2.3.2 Jaringan Kantor

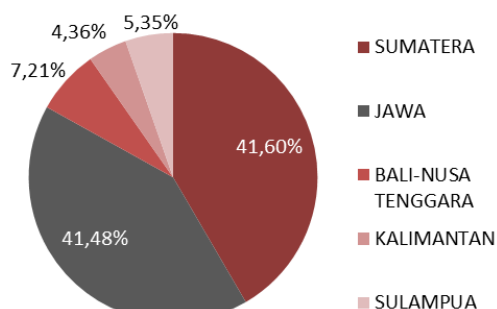
Pada triwulan I-2023, terdapat 6.697 jaringan kantor BUS, dengan dua di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (satu KC dan satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat penurunan sebanyak 79 jaringan kantor BUS seiring berlakunya POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, di mana untuk tiga jenis kantor yaitu kantor kas, *payment point*, kas keliling serta layanan syariah tidak lagi wajib dilaporkan pada jaringan kantor di APOLO sehingga jumlah kantor BUS terlihat menurun.

Tabel 27 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR		2022 TW IV	2023 TW I	Δ
1	Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	7	7	-
2	Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
3	Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	17	17	-
4	Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	378	378	-
5	Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	1	1	-
6	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.603	1.538	(65)
7	Kantor Kas Bank Umum Syariah	12	-	(12)
8	Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	343	343	-
9	Payment Point Bank Umum Syariah	-	-	-
10	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah	5	-	(5)
11	Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	1	-	(1)
12	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	4.397	4.407	10
13	Layanan Syariah Bank Umum	6	-	(6)
Layanan Syariah Bank Umum		6.776	6.697	(79)

Sumber: APOLO OJK

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar berada di wilayah Sumatera (41,60%, 2.785 kantor), diikuti Jawa (41,48%, 2.777 kantor), Bali-Nusa Tenggara (7,21%, 483 kantor), Sulampua (5,35%, 358 kantor), dan Kalimantan (4,36%, 292 kantor). Penurunan jaringan kantor terdapat pada semua wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa.

Grafik 48 Penyebaran Jaringan Kantor BUS

Sumber: APOLO OJK

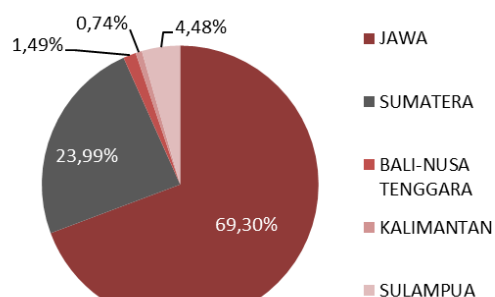
Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 938 jaringan kantor, bertambah 61 jaringan kantor dari triwulan sebelumnya.

Penambahan tersebut utamanya terdapat pada *payment point*. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (69,30%, 650 kantor), diikuti Sumatera (23,99%, 225 kantor), Sulampua (4,48%, 42 kantor), Bali-Nusa Tenggara (1,49%, 14 kantor), dan Kalimantan (0,74%, 7 kantor).

Tabel 28 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2022 TW IV	2023 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	167	171	4
- Kantor Cabang (KC)	210	217	7
- Kantor Kas (KK)	291	288	(3)
- ATM	72	74	2
- <i>Payment Point</i>	137	188	51
TOTAL	877	938	61

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Grafik 49 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS

Sumber: OJK

6 Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

6 Koordinasi Antar Lembaga Terkait Perbankan

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan I-2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global.

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, maka Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada Jumat, 28 April 2023, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan

Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan Rapat Berkala KSSK II tahun 2023. Dalam siaran Pers KSSK tersebut disimpulkan bahwa, **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan I-2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global.** Perkembangan positif ini ditopang koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang kuat seiring membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik.

Mencermati kondisi ketidakpastian global yang tinggi, OJK terus mewaspadai dampak rambatan kondisi tersebut pada sektor jasa keuangan nasional. Meskipun dampak rambatan ke domestik relatif terbatas, langkah antisipatif tetap diperlukan untuk memitigasi dampak lebih jauh pada pertumbuhan ekonomi, intermediasi dan SSK. Dalam kerangka tersebut, OJK meminta perbankan untuk:

1. Memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola dalam setiap aktivitas bisnis dan *lines of defense* bank telah dilakukan dengan baik, khususnya dalam pengelolaan portofolio aset produktif dan pendanaan serta memperhatikan

risiko konsentrasi yang berpotensi berdampak pada kinerja keuangan bank;

2. Mengkaji *recovery plan*, dan/atau parameter rencana lainnya secara berkala dengan mempertimbangkan potensi risiko signifikan yang dihadapi oleh bank, serta mengomunikasikannya;
3. Meningkatkan fungsi maupun peran *Asset and Liability Committee* dalam melakukan pengelolaan aset dan kewajiban bank serta mengidentifikasi potensi risiko melalui penyusunan skenario *stress test* yang komprehensif;
4. Melakukan pemantauan terhadap portofolio aset dan liabilitas bank termasuk risiko konsentrasi pada pinjaman dan pendanaan;
5. Memperkuat penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

KSSK berkomitmen terus meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi dalam mengantisipasi dinamika global terutama potensi rambatan pada domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.

Sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan UU P2SK secara kredibel. Selain itu, sosialisasi UU P2SK akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk DPR RI, pelaku industri keuangan, dan masyarakat.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2023.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan I-2023, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- a. Perizinan kelembagaan bank umum;
- b. Evaluasi pemeriksaan bank tahun 2022 dan rencana pemeriksaan bank pada tahun 2023;
- c. Pemantauan pencapaian realisasi dan target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi bank umum;
- d. Rencana Pengaturan dan Pengawasan dalam rangka Implementasi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA);
- e. Penguatan sinergi dan koordinasi BI-OJK di pusat dan daerah;
- f. Pelaksanaan pertukaran data dan/atau Informasi;
- g. Pemutakhiran daftar bank sistemik yang juga melibatkan LPS sebagai amanat UU P2SK;
- h. Pengembangan skenario *joint stress test* dan pelaksanaan *workshop*;
- i. Pembahasan rencana bisnis bank tahun 2023 s.d. 2025;
- j. Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan; dan

- k. Sosialisasi ketentuan terkait sektor perbankan.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa aspek kerja sama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 12 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2023 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS, antara lain:

- a. Pertukaran data dan pengkinian kondisi bank umum maupun BPR/BPRS;
- b. Penyelesaian permasalahan BPR/BPRS;
- c. Rencana integrasi penyampaian laporan keuangan tahunan BPR/BPRS;
- d. Penyesuaian serta penyelarasan sehubungan dengan perubahan istilah bank dalam pengawasan intensif dan bank pengawasan khusus menjadi bank dalam penyehatan pasca diterbitkannya UU P2SK;
- e. Pengaturan LPS terkait rencana resolusi bank dan hasil uji resolvabilitas pasca diterbitkannya UU P2SK;
- f. Diskusi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN III**GLOSSARY**

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets</i> (CEMA)	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

Istilah	Keterangan
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Fair Value Through Other Comprehensive Income</i> (FVTOCI)	Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai "tersedia untuk dijual" diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
<i>Fair Value Through Profit or Loss</i> (FVTPL)	Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)/ Tata Kelola	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya. Rating penilaian tata kelola perbankan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.
I	
<i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.

Istilah	Keterangan
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko No.11 Tahun 2017).
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPR merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)

Istilah	Keterangan
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai

Istilah	Keterangan
	dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset (ROA)</i>	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)

Halaman ini sengaja dikosongkan



Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dsapi@ojk.go.id

